

**PENGARUH KEPEMIMPINAN DISTRIK (CAMAT) TERHADAP
PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN DI DISTRIK(KECAMATAN) ARGUNI BAWAH
KABUPATEN KAIMANA**



Oleh :

BASCE FELAYATI SABUKU

45 06 021 010

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk mengikuti seminar sripsi
dalam rangka memperoleh gelar sarjana pada program studi
administrasi Negara**

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS "45"

MAKASSAR

2010

HALAMAN PENGESAHAN

**Judul Penelitian : PENGARUH KEPEMIMPINAN DISTRIK (CAMAT) TERHADAP
PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN DIDISTRIK ARGUNI BAWAH KABUPATEN
KAIMANA PAPUA BARAT“**

Nama : BASCE FELAYATI SABUKU
Nomor Pokok : 45 06 021 010
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Negara



**Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas“45”
Makassar untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas“45” Makassar, dengan susunan Panitia sebagai berikut
:**

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Syamsul Bachri".

Drs.Syamsul Bachri, Msi

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Natsir Tompo".

Drs. M.Natsir Tompo, Msi

Mengetahui

Menyetujui

Dekan Fakultas

Isipol Ketua Jurusan

Universitas “45” Makassar

Ilmu Administrasi Negara

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Juharni".
A blue circular stamp with a five-pointed star in the center. The text around the star reads "UNIVERSITAS 45 MAKASSAR" at the top and "PERPUSTAKAAN" at the bottom. Below the star, it says "FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK".

Dra. Hj. Juharni, Msi

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Misbahuddin Achmad".

Drs.H.Misbahuddin Achmad, MS

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Kamis, Tanggal Sebelas Agustus Tahun Dua Ribu Sebelas dengan judul :

“ PENGARUH KEPEMIMPINAN DISTRIK (CAMAT) TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DIDISTRIK (KECAMATAN) ARGUNI BAWAH KABUPATEN KAIMANA PROPINSI PAPUA BARAT “

Nama : BASCE FELAYATI SABUKU

Nomor Stambuk : 45 06 021 010

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Program Studi : Administrasi

Telah diterima oleh Panitia Ujian Sarjana Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas “45” Makassar, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Negara (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi.


Prof. Dr. ABD. Rahman, SH, MH

Rektor Univ. 45 Makassar

Pengawas Umum


Dra. Juharni Guntur, M, Si

Dekan Fisip

Panitia Ujian


Drs. Syamsuddin Macdun, M. Pd

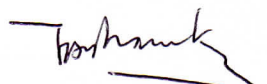
Wakil Dekan I


Drs. Misbahuddin Achmad, M, S

Ketua Jurusan Ilmu Adm Negara.

Tim Penguji

1. Drs. H. Husain Hamka. MS
2. Dra. Juharni, M, Si
3. Drs. Syamsul Bachri, M, Si
4. Drs. M. Natsir Tompo, M, Si


(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

PRAKATA

Assalamu Alaikum Warahmatulahi Wabarakatu

Puji Syukur Penulis Panjatkan kehadiran Allah SWT, yang mana telah memberikan rahmat dan hidayah-nya kepada penulis, sehingga Skripsi yang berjudul “ PENGARUH KEPEMIMPINAN DISTRIK (CAMAT) TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DISTRIK (KECAMATAN) ARGUNI BAWAH KABUPATEN KAIMANA PROPINSI PAPUA BARAT “dapat terselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam penyelesaian studi pada program Ilmu Administrasi Negara Di Universitas “45” Makassar.

Rampungnya Skripsi tidak akan tercapai tanpa doa dan, dukungan serta dorongan dari keluargaku, serta teman-temanku yang tercinta, maka dalam kesempatan ini penulis menghaturkan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya ucapan terimakasih kepada Ayahanda Tercinta HARUN. SABUKU dan Ibundah Tercinta JENIA. SASEFA Serta Kakaku tersayang ISKANDAR. SABUKU, SE beserta Istri tercintanya NANI WAHYUNI dan juga My Baby'Q ALGINA ZAKIA. SABUKU Serta My Husband ELIGIUS THO.Y.KAMBIA, begitupun teman-temanku yang tersayang Alfani, Manobi, Bilha Melo, Kalina.Jikwa, Didin. serta Adik-Adiku tersayang Carla. Manobi, Martina. Eria,dan Nafsia Ruwe.

Dalam Skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa pembahasan dan Analisisnya masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan baik secara tertulis maupun metodologinya untuk itu dengan lapang dada penulis menerima kritikan dan saran guna kesempurnaan skripsi ini.

Selama Proses penyusunan Skripsi ini Penulis Menghadapi berbagai masalah dan kendala namun berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak pada akhirnya hal tersebut dapat diatasi.

Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang setinggi-tingginya Kepada Yang Terhormat:

- ✦ Bapak Prof.Dr.Ir.Mir Alam, M,Si Selaku Rektor Universitas “45” Makassar.
- ✦ Ibu Dra.Juharni, M,Si Selaku Dekan Fisip Universitas “45” Makassar
- ✦ Bapak Drs.Syamsul Bachri. M,Si Selaku Pembimbing I dan Bapak Drs.M.Natsir Tompo. M,Si Selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama menyusun Skripsi ini.
- ✦ Bapak Syarif Syefiada. Sag. Beserta keluarga yang telah banyak memberikan suport dan dorongan kepada penulis dalam menyusun Skripsi ini.
- ✦ Bapak Drs.Amandus Yokaf ,selaku kepala Distrik Arguni Bawah Kab.Kaimana
- ✦ Keluarga Besar Sabuku, dan Keluarga Besar Sasefa yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.
- ✦ Segenap Dosen dan Staf Fakultas Isipol yang telah banyak membantu dalam Pengurusan Administrasi.
- ✦ Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fisip Universitas “45” Makassar.
- ✦ Semua Pihak yang telah membantu yang tidak dapa penulis sebut namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-nya Kepada Bapak, Ibu Serta teman-teman sebagai balasan atas jasa yang telah disumbangkan untuk penulis. Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat dapat bermanfaat bagi kita semua terutama menambah khasanah Ilmu Pengetahuan serta dapat berguna untuk penelitian lanjutan. TERIMA KASIH.

Billahi Taufik Walhidayah Wassalamu Alaikum Waramahtullahi Wabarakatuh.

Makassar, 11 Agustus 2011

Basce F Sabuku

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| PRAKATA..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Batasan dan Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 5 |
| D. Kerangka konseptual | 6 |
| E. Metodologi Penelitian | 7 |
| F. Sistematika penulisan | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Beberapa pengertian Pokok | 10 |
| B. Gaya dan Tipe Kepemimpinan | 18 |
| C. Azas Kepemimpinan | 20 |
| D. Bentuk Partisipasi..... | 27 |
| E. Cara Menggerakkan dan Memperkuat Partisipasi | 29 |
| F. Pengaruh Kepemimpina Camat..... | 35 |

| | | |
|----------------|--|-----------|
| BAB III | GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | |
| | A. Administrasi Pemerintah dan Keadaan Demografi | 39 |
| | B. Struktur Organisasi Kecamatan Arguni Bawah | 40 |
| | C. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Dalam Wilayah Kecamatan Arguni Bawah..... | 48 |
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 54 |
| | A. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan Arguni Bawah Kabupaten Kaimana..... | 57 |
| | B. Kepemimpinan Camat dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan Arguni Bawah ... | 64 |
| | C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Camat Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan | 71 |
| BAB V | PENUTUP | 74 |
| | A. Kesimpulan | 74 |
| | B. Saran-Saran | 75 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah dengan menganut asas desentralisasi seperti yang diamanatkan UU. No 32 tahun 2004 (Revisi dari UU No. 22 tahun 1999) memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perubahan yang mendasar dengan lebih mendekatkan pemerintah (jangkauan pelayanan public) kepada masyarakat, sehingga peran pemerintah sebagai pelayan publik semakin terasa, serta keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat ditingkatkan. Penegasan keberhasilan otonomi daerah tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat terhadap pembangunan, dalam arti masyarakat diberi kepercayaan dan kewenangan yang cukup untuk mengurus rumah tangga desanya sehingga bisa mandiri sesuai dengan potensi dan sumber daya yang ada.

Seluruh sumber daya manusia mutlak harus dioptimalkan sehingga tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat bisa tercapai. Pembangunan dari pelayanan pemerintah berdiri diatas prinsip-prinsip partisipasi dengan mengambil konsep sosial budi masyarakat lokal diseluruh nusantara.

Namun begitu dalam prakteknya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pelayanan telah dibatasi oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari proyek-proyek yang dijalankan pemerintah.



Kelompok-kelompok masyarakat sering dibentuk hanya untuk berpartisipasi diakhir proses yaitu untuk menerima input dari pemerintah, tanpa memiliki peran merencanakan dan mengevaluasi proyek-proyek pembangunan tersebut. Untuk menciptakan pelayanan yang bermutu, seluruh pihak yang terkait masyarakat, aparat pemerintah dan administrasi daerah pada semua tingkatan, serta staf dari sektor swasta atau sektor lainnya perlu dilibatkan dalam seluruh aspek pembagunan dan pelaksanaannya. Termasuk dalam identifikasi awal, persiapan, analisis dan studi, perencanaan rincian program, serta seluruh aspek pada pelaksanaan proyek pembangunan. Manfaat utama yang diperoleh dengan penggunaan pendekatan partisipasi ini, khususnya pada tingkat lapangan atau ditempat pelayanan, adalah bahwa penerima pelayanan (masyarakat) akan terbedayakan untuk lebih terlibat dalam pengembangan pembangunan.

Sehingga masyarakat akan mampu untuk mengidentifikasi peluang atau masalah yang mereka hadapi, memutuskan apa yang harus dilakukan, dan akan menginvestasikan sumber-sumber daya yang ada. Oleh karena itu peran kepemimpinan pemerintah kecamatan sangat dibutuhkan untuk mampu

mempengaruhi masyarakat agar mau berpartisipasi dengan kesadaran penuh untuk mencapai tujuan.

Seperti yang dikatakan Slamet bahwa

"kepemimpinan adalah kegiatan mencapai tujuan tertentu. Peran kepemimpinan dalam efektivitas pencapaian tujuan dapat dilakukan dengan melakukan upaya-upaya memberikan bimbingan dan pengarahan, mempengaruhi perasaan dan perilaku orang lain, serta menggerakkan orang lain sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama, dan mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat". (dalam Jabal, 2002:152)

Dari pandangan tersebut diatas, dapat di gambarkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan memerlukan rangsangan dari pemerintah kecamatan dalam hal ini seorang camat, karena pada hakekatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan ini, haruslah diletakkan sebagai konsep yang utama yaitu konsep yang bersistem, sebagai syarat, cara dan tujuan.

Bahkan merupakan hak dasar masyarakat untuk terlibat secara kreatif dalam proses perencanaan serta dalam menikmati hasil-hasil pembangunan secara adil dan manusiawi. Namun kecenderungan yang terjadi selama ini bahwa pola kebijaksanaan pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan program pembangunan desa, sampai kepala evaluasi, jarang sekali melibatkan warganya. Masyarakat tidak diajak bicara atau tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan sehingga wajar saja kalau partisipasi masyarakat sangat kurang, swadaya masyarakat tidak muncul, dan masyarakat tidak dapat mengerti, melihat, dan merasakan manfaat dari pembangunan.

Seperti yang terlihat di Distrik Arguni Bawah berdasarkan pengamatan penulis, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya gotong royong, serta pembangunan yang jalan ditempat menunjukkan kurangnya kepedulian dan sikap apatis masyarakat. Untuk merespon hal-hal demi terciptanya keberhasilan pembangunan, maka dituntut peran serta aktif dari segenap lapisan masyarakat, partisipasinya dalam hal ini adalah elemen dasar dan prasyarat mutlak yang harus dipenuhi karena mekanisme pelaksanaan pembangunan pada prinsipnya harus dilaksanakan pada swadaya gotong royong masyarakat. Dalam kaitan ini Sajogjo memberikan pandangan bahwa :

“kegiatan-kegiatan partisipasi masyarakat yang timbul dari bahwa sebagai institusi dan kreasi yang lahir dari rasa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat, mutlak perlu sebagai hakekat pembangunan yang pada prinsipnya dilakukan masyarakat dengan pengarahannya, bimbingan dan pengawasan pemerintah”. (1989:14)

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini mencoba menelaah permasalahan tersebut yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kecamatan Arguni Bawah, kabupaten Kaimana.

2. Bagaimanakah pelaksanaan kepemimpinan Camat dan pengaruhnya terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kecamatan Arguni Bawah.
3. kendala-kendala yang dihadapi Camat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kecamatan arguni Bawah, Kabupaten Kaimana.
- b. Untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan Camat dan pengaruhnya terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kecamatan Lembah Melintang.
- c. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Camat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2. Kegunaan Penelitian.

a. Kegunaan Umum

1. Bagi pemerintahan kecamatan (distrik) Arguni Bawah, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta masukan yang berguna kedepan.
2. Dapat dijadikan sebagai bahan bacaan bagi masyarakat umum.

b. Kegunaan Khusus (Akademik).

1. Penelitian ini sebagai syarat utama untuk meraih gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Administrasi, program studi Ilmu Administrasi Negara.
2. Sebagai salah satu bentuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu administrasi.

D. Kerangka Konseptual

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian, maka secara struktural dan fungsional peranan aparatur pemerintah dalam pembangunan daerah sangatlah menentukan. Sehingga harapan untuk tercapainya pembangunan yang berkesinambungan ditentukan oleh aparatur pemerintah sebagai pelaksana pembangunan. Aspek prasarana dan sarana merupakan faktor penting dalam melansir upaya pembangunan daerah. Prasarana dan sarana ini sangat beragam dan mencakup bidang-bidang : penyediaan energi, industri dan perdagangan, ketenagakerjaan, pekerjaan umum dan perhubungan. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kaimana terkait dengan prasarana dan sarana ditujukan untuk memberikan pelayanan, motivator dan dinamisator terhadap kegiatan pembangunan yang sedang dan akan berjalan. Hal lain yang tercakup dalam pengembangan *quality of work life* ini adalah desain kantor secara fisik. Desain ini selain harus menunjang arus kerja yang ada juga menyangkut kenyamanan pegawai dalam melakukan pekerjaan.

Input

Proses

Output

**Pengaruh
kepemimpinan
Kepala Kecamatan
dalam partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan**

a. adanya perhatian
terhadap
organisasi
kepemudaan
b. adanya perhatian
terhadap
kelompok adat
c. Mengadakan
Sosialisasi Secara
Berkala ke
Kampung-
kampung

**Delayanan
yang efektif**

a. Menjadi Motivator dan Pengayom
b. Mendekatkan diri ke dalam lingkungan Masyarakat
c. Menjadi panutan dalam bermasyarakat
d. Terbuka dalam bersikap

Faktor yang mempengaruhi
-Faktor kesadaran
-Faktor Pengetahuan
-Kemampuan Bahasa
-Kondisi Alam

Bagian yang intensif berhubungan dengan bagian lainnya seyogyanya berada pada lokasi yang berdampingan, atau bagian yang paling banyak berhubungan dengan masyarakat maka harus ditempatkan di lokasi yang paling mudah dijangkau oleh mereka, seperti bagian terdepan misalnya. Arus kerja harus didesain terlebih dahulu baik dari kepentingan internal organisasi dan terutama dari kepentingan konsumen. Desain kantor juga seyogyanya mempertimbangkan kenyamanan pegawai dalam bekerja. Hal ini menyangkut kebersihan, keindahan, ketenangan, kelengkapan sarana dan prasarana pelaksanaan pekerjaan, dan kemudahan berinteraksi dengan rekan sejawat yang paling dekat bidang tugasnya, serta mampu pula menjaga *privacy* masing-masing pegawai.

E. Metode penelitian

Dalam penelitian ini membutuhkan data yang tepat obyektif sehingga diperlukan metode dan teknik penelitian yang relevan dengan obyek diteliti. Sehubungan dengan itu maka metode dan teknik penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Tipe dan Dasar Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan tipe penelitian deskriptif yakni untuk melihat, menggambarkan dan menjelaskan sejauhmana kepemimpinan camat dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat di distrik Arguni Bawah di kabupaten Kaimana. Sedangkan dasar penelitian yang di gunakan adalah

metode survey yakni menjelaskan bagaimana peranan camat dalam mempengaruhi masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang akan diteliti. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Penduduk / warga Kecamatan Arguni Bawah, yang berjumlah 20.327 jiwa

b. Sampel

Sampel yang di tarik dari Setiap Kampung menggunakan purposive sampling yaitu menentukan responden yang diperlukan secara sengaja. Responden atau sampel yang diperlukan dapat mewakili populasi besarnya sampel sebanyak 99 orang

a. Informan:

Setiap kepala kampung yang terdiri dari 5 Kampung (desa) yaitu.

| | | |
|---------|---------|---|
| Kampung | Seraran | 1 |
| Kampung | Nagura | 1 |
| Kampung | Tausan | 1 |
| Kampung | Ukiara | 1 |
| Kampung | Sumun | 1 |
| <hr/> | | |
| | Jumlah | 5 |

3. Jenis Pengumpulan Data

Data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah:

- a. **Data primer.** Yaitu data yang penulis kumpulkan melalui penelitian secara langsung dilapangan. Data tersebut penulis peroleh dengan cara:
 - 1) **Observasi** yaitu pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian.
 - 2) **Wawancara** yaitu melakukan Tanya jawab dengan informan yang dapat memberikan informasi sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
 - 3) **Kuesioner** yaitu mengedarkan daftar pertanyaan yang telah tersusun secara sistematis untuk kemudian diolah dan dianalisa.
- b. **Data sekunder,** yaitu data yang penulis peroleh melalui buku-buku, catatan-catatan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti

4. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif berdasarkan data yang ada pada table dengan menghubungkan data-data atau informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan informan

F.Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan penelitian ini maka pembahasan dibagi 5 (lima) bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, yaitu Pendahuluan yang menguraikan tentang; Latar Belakang Masalah, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka konseptual, Metode Penelitian, dan Sisitematika Pembahasan.

Bab Kedua, yaitu Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang Beberapa Pengertian Pokok, Gaya dan Tipe Kepemimpinan , Asas dan fungsi kepemimpinan .

Bab Ketiga, tentang Struktur Organisasi kecamatan Arguni Bawah Kabupaten Kaimana, Keadaan Pegawai Negeri Sipil Dalam Wilayah kecamatan Arguni Bawah, Visi dan Misi dan Renstra Kecamatan Arguni Bawah.

Bab Keempat, yaitu hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang, pengaruh kepemimpinan camat terhacap partisipasi masyarakat Kabupaten Arguni Bawah, dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan pembangunan di kecamatan Argun Bawah.

Bab Kelima, yaitu menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran-Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Beberapa Pengertian pokok.

1. Pengertian Kepemimpinan

Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, dan bermacam macam. Karena perbedaan kebutuhan ini maka manusia saling membutuhkan. sehingga diperlukan kerjasama yang melahirkan suatu wadah atau tempat berkumpul maka terciptalah suatu komunitas atau organisasi yang mempunyai tujuan yang sama. Setiap komunitasn atau organisasi membutuhkan seorang pemimpin yang menjalankan kegiatan kepemimpinan. Seorang pemimpin adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap kelompoknya dengan kata lain seorang pemimpin membutuhkan anggotanya untuk dapat bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Menurut Prof. Dr. V. Rifai “pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk menggerakkan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan”. (2003:30).Juga mengatakan dalam buku yang lain Kreith dan Knicki. “kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara sukarela”. (dalam Nawawi, 2003:21)

Pengertian ini menekankan pada kemampuan pemimpin yang tidak memaksa dalam menggerakkan anggota organisasi agar mau melakukan pekerjaan/kegiatan

yang terarah pada tujuan organisasi. Artinya seorang pemimpin harus mampu memberikan contoh tauladan yang baik agar dengan sendirinya anggotanya akan Mengikutinya. Menurut Gibson “ kepemimpinan adalah upaya menggunakan berbagai jenis pengaruh yang bukan paksaan untuk memotivasi anggota organisasi agar mencapai tujuan tertentu. “. (dalam Nawawi, 2003: 21)

Kepemimpinan adalah usaha seorang pemimpin untuk dapat membangkitkan rasa percaya diri anggotanya untuk melakukan sesuatu dengan sukarela pada tujuan tertentu. Motivator ulung adalah salah satu faktor orang memilihnya untuk jadi pemimpin selain harus dapat menjadi tauladan baik, juga harus mampu memotivasi bawahannya, karena dengan motivasi akan timbul komunikasi yang baik sehingga menyebabkan seseorang dapat berbuat dengan tanpa paksaan dan rasa percaya diri yang tinggi. Menurut

“ kepemimpinan adalah seorang pemimpin dalam proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok”. Rivai (2003:21)

Tiga aplikasi penting dalam kepemimpinan yaitu:

- a. Kepemimpinan itu meliibatkan orang lain baik itu bawahan maupun pengikut.
- b. Kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang

- c. Adanya kemampuan untuk menggunakan berbagai bentuk kekuasaan yang berbeda-beda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya menjadi pemimpin yang baik dan bertanggung jawab serta berkualitas. Dari definisi diatas dapat dilihat bahwa kepemimpinan menyangkut orang mempengaruhi orang lain guna mencapai tujuan yang diinginkan. .

Untuk itu kepemimpinan memerlukan keahlian atau kemampuan agar orang lain dapat digerakkannya. Artinya pemimpin dapat memotivasi bawahannya sehingga bawahan mau bekerja secara sukarela tanpa paksaan. Kepemimpinan merupakan suatu faktor penentu dalam suatu organisasi, karena kedudukannya penting dan strategis. Menurut S.P.Siagian "kepemimpinan merupakan inti manajemen, karena kepemimpinan merupakan motor penggerak bagi sumber-sumber dan alat-alat Manusia alat-alat lainnya dalam suatu organisasi". (1985 : 36)

Demikian pentingnya peranan kepemimpinan dalam usaha mencapai tujuan organisasi, sehingga dapat dikatakan bahwa sukses dan kegagalan yang dialami sebagian besar ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang dimiliki oleh orang-orang yang disertai tugas memimpin dalam suatu organisasi. Pemimpin yang berkualitas adalah pemimpin yang dilandasi dengan ketakwaan, jujur, menggerakkan kebenaran, keberanian dan tanggung jawab, keikhlasa, kesabaran dan ketabahan. Untuk itu perlu diketahui unsur-unsur kepemimpinan bagi seorang pemimpin yaitu:

- a. .Mempunyai satu tujuan tertentu.
- b. Kepemimpinan itu terlepas dari persoalan persoalan pencapaian kerjasam a yang harmonis untuk mencapai tujuan tertentu.
- c. Kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau orang lain. Pemimpin tidak bekerja sendiri untuk mencapai tujuan organisasinya, tetapi harus dibantu orang lain dalam hal ini anggotanya, untukitu pemimpin harus dapat menciptakan suasana yang kondusif di lingkungannya sehingga menghasilkan efisiensi kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Disisi lain pemimpin harus menyatu dengan bawahan namun wibawa sebagai seorang pemimpin harus tetap dijaga. Aktulisasi seorang pemimpin adalah menciptakan suasana dan pola kepemimpinan

Pada masa lalu dan bahkan sekarang, banyak orang berpendapat tentang kepemimpinan yaitu:

- a. Kepemimpinan sebagai seni menempatkan bakat sebagai factor penting dan berpengaruh besar terhadap kemampuan mewujudkannya, artinya kepemimpinan akan efektif dan efesian bila ditangani orang-orang yang berkualitas.
- b. kepemimpinan sebagai ilmu, lebih menitik beratkan pada proses belajar dan latihan, artinya kepemimpinan akan efektif dan efesien bila ditangani orang terampil dan terlatih dalam memimpin kemampuan dapat diperoleh melalui proses belajar dan melatih diri secara intensif (Rivai,2003:42).

Kedua pendapat diatas adalah benar, akan tetapi salah satunya tidak mutlak, artinya kepemimpinan sebagai seni perlu, akan tetapi kepemimpinan sebagai ilmu juga penting, karena tanpa belajar seorang pemimpin akan mengalami kesulitan. Dengan kata lain bakat yang besar dengan kualitas yang baik ditambah dengan kemampuan yang terlatih serta pengalaman yang cukup dalam memimpin akan menjadi pemimpin yang bijak serta mempunyai tanggung jawab dan tugas yang jelas. Beberapa sifat-sifat yang penting dalam kepemimpinan menurut Ghiselli dalam bukunya "*exploration in managerial talent*" (dalam Handoko,1984:297), yakni:

- a. Kemampuan dalam kedudukannya sebagai pengawas atau pelaksanaan fungsi-fungsi dasar manajemen, terutama dalam pengarahan dan pengawasan pekerjaan orang lain.
- b. Kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan, mencakup pencarian tanggung jawab dan keinginan sukses.
- c. Kecerdasan, mencakup kebijakan, pemikiran kreatif dan daya pikir.
- d. Ketegasan atau kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan dan memecahkan masalah dengan cepat dan tepat
- e. Kepercayaan diri dan inisiatif dalam mengembangkan serangkaian kegiatan dalam menemukan cara-cara baru atau inovasi. Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa sangat banyak dibutuhkan kemampuan dan kualitas seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya, dan seorang pemimpin yang memiliki sifat-

sifat yang penting seperti kecerdasan, kepercayaan diri, inisiatif dan inovatif, ketegasan

2 Sebab-sebab Munculnya Pemimpin

Mengenai sebab-sebab munculnya seorang pemimpin para ahli telah menemukan beberapa teori Kartono (1995:29) mengatakan ada tiga teori dalam menjelaskan kemunculan pemimpin yaitu:

- a. Teori Genetis, teori ini menyatakan pertama, pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat alami yang luar biasa sejak lahirnya. Kedua, dia ditakdirkan lahir menjadi pemimpin dalam situasi yang bagaimanapun juga.
- b. Teori sosial, teori ini menyatakan pertama, pemimpin itu harus disiapkan, dididik dan dibentuk, tidak terlahirkan begitu saja. Kedua, setiap bisa menjadi pemimpin, melalui usaha penyiapan dan pendidikan serta dorongan oleh kemauan sendiri.
- c. Teori ekologis, teori ini muncul atas reaksi dari kedua teori diatas yaitu seseorang akan sukses menjadi pemimpin apabila sejak lahir dia telah memiliki bakat kepemimpinan dan bakat ini sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan, juga sesuai dengan tuntutan lingkungan/ekologisnya.

3 Teori Kepemimpinan

Pada umumnya teori kepemimpinan berusaha untuk memberikan penjelasan mengenai pemimpin dan kepemimpinan dengan mengemukakan beberapa segi, salah satunya adalah teori perilaku (behaviour theories). Teori ini bertolak dari pemikiran Nanawi bahwa "kepemimpinan untuk mengefektifkan organisasi, tergantung pada perilaku atau gaya bersikap dan gaya bertindak seorang pemimpin". (2003:81).

Dengan demikian teori ini memusatkan perhatiannya pada fungsi-fungsi kepemimpinan. Artinya disini bahwa keberhasilan atau kesuksesan seorang pemimpin dalam mengefektifkan organisasi, sangat tergantung pada prilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinannya didalam strategi kepemimpinannya. Gaya atau perilaku kepemimpinan tampak dari cara melakukan pengambilan keputusan, cara memerintah, memberikan tugas, cara berkomunikasi, cara mengendalikan dan mengawasi pekerjaan anggota organisasi, cara memimpin rapat dan memberi sanksi/hukuman. Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa pendekatan teori perilaku melalui gaya kepemimpinan merupakan strategi kepemimpinan yang memiliki dua orientasi yang terdiri dari:

- a. Orientasi pada tugas.
- b. Orientasi pada bawahan/orang. Blake (dalam Nanawi, 2003:83) menyimpulkan bahwa kepemimpinan yang efektif atau yang mampu mengefektifkan organisasi untuk mencapai tujuannya dapat diwujudkan dengan kombinasi perilaku atau gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan

pada bawahan atau orang. Dalam penelitian ini penulis mencoba menggunakan pendekatan teoridalam kepemimpinan dalam landasan berpikir untuk menerangkan hubungan antara konsep yang akan diuraikan.

B .Gaya dan Tipe Kepemimpinan

Likert (dalam Nawawi, 2003:90) menyusun teorinya bertolak dari dua jenis perilaku atau gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan pada bawahan atau orang. Likert membagi perilaku atau gaya kepemimpinan menjadi empat system sebagai berikut:

- a. *Ekplorative Autocratic* yaitu perilaku atau gaya kepemimpinan ditunjukkan oleh pemimpin sebagai pihak yang berhak menyelesaikan masalah-masalah organisasi ,dengan berperilaku sebagai satu-satunya pengambil keputusan dan memberikan perintah yang harus dilaksanakan oleh anggotanya.
- b. *Benovolent Autocratic* yaitu perilaku atau gaya kepemimpinan ini ditunjukkan dengan sudah mulai memberikan kesempatan pada anggota organisasi/bawahan untuk menyampaikan komentar pada terhadap keputusan dan perintah pimpinan sebagai atasan.
- c. *participative* yaitu perilaku atau gaya kepemimpinan ini ditunjukkan dengan memberikan kesempatan pada anggota organisasi / bawahan ikut serta dalam menetapkan tujuan, membuat keputusan dan mendiskusikan perintah-perintah.

- d. *Democratic* yaitu perilaku atau gaya kepemimpinan ini ditunjukkan dengan melakukan pemecahan masalah pekerjaan dan organisasi secara bersama-sama. Dari keempat gaya kepemimpinan diatas, maka gaya kepemimpinan partisipatif dan demokratis sangat mendukung untuk terciptanya kepemimpinan yang efektif, dalam hal ini untuk meningkatkan partisipatif masyarakat, gaya kepemimpinan merupakan dasar dalam mengklasifikasikan tipe-tipe kepemimpinan.

Menurut Kartono (1995: 56) ada tiga tipe kepemimpinan yaitu :

- a. Tipe Kepemimpinan Otoriter, tipe ini menempatkan kekuasaan disatu orang, bertindak sebagai penguasa tanggal kedudukan dan tugas anak buah semata-mata hanya sebagai pelaksana keputusan, perintah dan kehendak pemimpin.
- b. Tipe pemimpin bebas, tipe ini merupakan kebalikan dari tipe yang pertama, pemimpin hanya sebagai symbol. Gagasan diberikan secara penuh pada orang yang dipimpin.
- c. Tipe kepemimpinan demokratis, tipe ini menempatkan manusia sebagai factor utama dan kepentingan dalam suatu organisasi. Pemimpin memandang dan menempatkan orang-orang yang dipimpinya sebagai subjek yang memiliki kepribadian dengan berbagai aspek dirinya sendiri. Dari ketiga tipe kepemimpinan diatas, penulis mengacu pada tipe kepemimpinan yang demokratis, karena tipe ini telah memandang manusia sebagai subjek yang dapat bekerja sama. Artinya manusia memiliki nilai-nilai moral yang baik

dimana peran pemimpin cukup memberi ruang pada manusia untuk mengembangkan potensi nilai-nilai tersebut.

C. Asas dan fungsi kepemimpinan

Nawawi Mengemukakan “kepemimpinan yang efektif hanya akan terwujud apabila dijalankan sesuai dengan fungsinya”. (1992: 74). Fungsi kepemimpinan itu berhubungan langsung dengan situasi social dalam kehidupan kelompok/organisasi masing-masing yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada didalam dan bukan diluar situasi itu. Pemimpin harus berusaha agar menjadi bagian dalam situasi social yang ada maka ini akan dirasakan sebagai keputusan yang diambil adalah untuk kepentingan bersama, dengan demikian seorang pemimpin akan dapat menjalankan fungsinya sebagai pemimpin jalan dengan situasi sosial yang ada. Ada beberapa azas yang perlu diperhatikan dalam kepemimpinan

a. Azas kemanusiaan Artinya memperhatikan bawahan/ pegawai dan memandang mereka sebagai manusia, mereka tidak hanya dipandang sebagai mesin.

b. Azas Efisiensi

Bagaimana pemimpin bisa mengkombinasikan/ mengefisiensikan sumber daya yang terbatas untuk kepentingan bersama.

c. Azas Kesejahteraan

Azas ini perlu diperhatikan pemimpin untuk mengurangi kesenjangan dan konflik yang dapat mengganggu jalannya organisasi.

Menurut Nawawi (1992: 75:) menyatakan secara operasional dapat dibedakan lima fungsi pokok kepemimpinan yakni:

a. Fungsi Instruktur

Fungsi ini berlangsung dan bersifat satu arah. Pemimpin sebagai pengambil keputusan berfungsi memerintahkan pelaksanaannya pada orang-orang yang dipimpin. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa (isi perintah), bagaimana (cara mengerjakan perintah), dan dimana (tempat mengerjakan perintah) agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif.

b. Fungsi konsultatif

Fungsi ini berlangsung dan bersifat dua arah, meskipun pelaksanaannya sangat tergantung pada pihak pemimpin. Pada tahap pertama dan usaha menetapkan keputusan, pemimpin kerap kali memerlukan bahan pertimbangan, yang mengharuskan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Bisa terbatas dengan orang-orang tertentu saja atau mendengarkan saran dan pendapat. Bisa juga dilakukan secara meluas melalui pertemuan dengan sebagian besar atau semua anggota kelompok/organisasinya bila keputusan yang akan ditetapkannya sangat penting.

c. Fungsi Partisipasi

Fungsi ini tidak sekedar berlangsung dan bersifat dua arah, tetapi juga berwujud pelaksanaan hubungan manusia yang efektif, antara pemimpin



dengan semua orang yang dipimpinnya. Dalam menjalankan fungsinya pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya, yang berlangsung secara terkendali dan terarah berupa kerja sama dengan mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain.

d. Fungsi Delegasi

Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat, menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan, pemimpin harus bersedia dan dapat mempercayai orang lain, sesuai dengan posisi/jabatannya.

e. Fungsi Pengendali

Fungsi ini cenderung bersifat komunikasi satu arah, meskipun tidak mustahil untuk dilakukan dengan cara komunikasi dua arah. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses/ efektif mampu mengatur anggotanya secara terarah dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal.

1. Kepemimpinan Camat

Berdasarkan pasal 126 UU otonomi daerah No 22 tahun 2004, dijelaskan bahwa :

1. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/ kota dengan peraturan berpedoman pada peraturan pemerintah.
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati/wali kota untuk menangani sebagian urusan daerah.
3. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, camat juga menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan:
 - a. Mengkordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Mengkordinasikan upaya penyelenggaraan ketentuan dan ketertiban umum.
 - c. Mengkordinasikan penerapan dan penegakan perundang-undangan.
 - d. Mengkordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
 - e. Mengkordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan.
 - f. Mengkordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan.
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan.

Camat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diangkat oleh bupati/walikota atau usul sekretaris daerah kabupaten/ kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai per-undangundangan.5. Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/ kota.

6. Perangkat kecamatan bertanggung jawab kepada camat.

7. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat(5), ayat (6) ditetapkan dengan peraturan Bupati atau walikota berpedoman pada peraturan daerah.

2. Partisipasi Masyarakat

Pada dasarnya partisipasi merupakan perwujudan asas kekeluargaan yang telah dimiliki oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu. Istilah lain partisipasi sering menjadisinonim dari peran serta, keterlibatan dan keikutsertaan yang terwujud dalam sikapgotong-royong. Setelah runtuhnya rezim orde baru yang bersifat otoriter, makasudah saatnya dominasiNegara dipersempit untukmengatur arah dan cita-cita masyarakat. Masyarakat diharapkan untukdapat berperan aktifdalamproses politik, serta menentukan nasib ekonominya,dan dapat melestarikan budayanya.Drawali *regulasi* Undang-undang No.22 tahun 1999 mengenai ekonomi

daerah yang dijadikan sebagai landasan yuridis untuk menggeser focus politik kearah daerah dan desa. Melalui otonomi daerah ini diharapkan mampu melahirkan partisipasi aktif dan menumbuhkan kemandirian masyarakat. Menurut penjelasan Mubyanto (dalam Ndaraha) partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri (1987:102).

Partisipasi menimbulkan harapan diri dan kemampuan pribadi untuk turut sertadalam menentukan keputusan yang menyangkut masyarakat, dengan kata lain partisipasi adalah bentuk memanusiakan manusia. Partisipasi merupakan cara yang paling efektif untuk mengembangkan kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan kebutuhan dan rasa memiliki masyarakat terhadap agenda pemerintah, permasyarakatan dan pembangunan. Menunjukkan dari pengertian diatas, partisipasi masyarakat meliputi keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program dan mengevaluasi program-program. partisipasi juga berkaitan dengan usaha tergantung untuk meningkatkan control atas sumbernya dan institusi regulasi dalam situasi social tertentu, serta membangun kemitraan berdasarkan dialog yang disusun secara bersama. Secara umum partisipasi dimaknai sebagai proses, yang melalui prosesitu stakeholders mempengaruhi dan membagi control atas prakarsa pembangunan dan keputusan dan sumber daya yang mempengaruhi mereka.

“mengatakan partisipasi adalah penyertaan mental serta emosiseorang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan

dayapiker dan perasaan mereka pencapaian tujuan organisasi dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap organisasi tersebut” Tjokrowinoto (1994:24).

“partisipasi adalah keterlibatan mental maupun emosional, ini berarti seseorang memberikan pikiran, perasaan dan aspek kejiwaan, sehingga dapat menimbulkan tanggung jawab dalam dirinya” Davis (dalam Sastroepetro, 1986:15).

Dari kedua pendapat di atas terlihat bahwa mereka menyoroti partisipasi dengan lebih menekankan pada aspek kejiwaan. Partisipasi masyarakat khususnya masyarakat desa dibangun oleh landasan nilai-nilai ideal sebagai berikut:

- a. Unsur kesadaran yang lahir dari dalam diri warga masyarakat / desa secara otentik untuk terlibat dalam proses politik dan pembangunan. Nilai inilah yang membedakan partisipasi dengan mobilisasi.
 - b. Penempatan diri warga masyarakat sebagai subjek kebijakan dan pembangunan.
 - c. Peran-peran aktif yang sifatnya dialogis sehingga menjamin kesetaraan antar warga masyarakat.
 - d. Suasana kebersamaan antar warga sebagai bentuk jalinan solidaritas sosial.
- Dengan demikian partisipasi didekatkan dengan semangat kebersamaan warga desa, tidak terbatas pada tingkat peran individual semata tetapi bersifat kolektif

e Pelembagaan dan keterlanjutan pembangunan. Dari nilai-nilai diatas dapat kita pahami bahwa kesadaran yang lahir dalam diri seorang warga masyarakat adalah merupakan modal yang kuat untuk proses pembangunan, karena kesadaran yang timbul tanpa ada paksaan akan menumbuhkan kepercayaan diri yang menyulitkan seseorang untuk dipengaruhi atau dimobilisasi.

D. Bentuk Partisipasi

Menurut Kumorotomo(1992:136) secara umum corak partisipasi warga Negara dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu:

1. Partisipasi dalam penelitian (electoral participation). Ini merupakan corak partisipasi yang paling mudah dilihat karena biasanya bersifat rasional. Aktivitas partisipasi massadalamhal ini ditujukan untuk memilih wakil-wakil rakyat, mengangkat pemimpin, atau menerapkan ideologypembangunan tertentu
- .2. Partisipasi kelompok (group participation) warga Negara bergabung dalam kelompok-kelompok tertentu untk mencurahkan aspirasi mereka
- .3. Kontak warga Negara dan pemerintah (citizen government contacting) proses komunikasi dapat terjalin antar warga Negara dengan pemerintahnya dengan cara menulis surat, menelpon atau pertemuan secara pribadi. Kontak juga bisa berlangsung dalam pertemuan-pertemuan mulai tingkat desa hingga rapat akbar yang melibatkan seluruh warga.
4. Partisipasi warga Negara secara langsung dilingkungan pemerintahan. Partisipasi seperti ini mensyaratkan keterlibatan langsung seorang warga Negara didalam pembuatan kebijakan pemerintah. Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa bentuk-bentuk partisipasi bagi warga Negara yang diantaranya paling mudah dilihat adalah partisipasi dalam pemilihan yang ada di desa-desa.

Sedangkan Ndraha (1983 : 125) menyatakan bentuk-bentuk partisipasi yakni :

1. Partisipasi dalam menerima dan memberi informasi.

2. Partisipasi dalam pemberian tanggapan dan saran terhadap informasi yang diterima, baik yang menolak, menerima dengan syarat serta menerima sepenuhnya.
3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan.
4. Partisipasi dalam pelaksanaan Operasional pembangunan.
5. Partisipasi dalam menerima kembali hasil pembangunan.
6. Partisipasi dalam menilai pembangunan.

Dari uraian tersebut terlihat bahwa segala macam bentuk partisipasi yang bias disajikan acuan dalam menjalankan roda pemerintahan, khususnya di desa. Dengan terlibatnya masyarakat dalam bentuk partisipasi yang ada maka pelaksanaan pembangunan akan semakin mudah dijalankan karena partisipasi aktif masyarakat dalam segala segi pembangunan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta menikmati hasil pembangunan.

E. Cara Menggerakkan dan Memperkuat Partisipasi

Perbaikan kondisi hidup masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dapat menggerakkan partisipasi. Agar perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat dapat menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus:

1. Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban yang dikehendaki.
2. Disajikan stimulasi terhadap masyarakat, yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban yang dikehendaki.

3. Disajikan motivasi terhadap masyarakat, yang berfungsi membangkitkan tingkah laku yang dikehendaki.

Ndraha(1987: 104) “ menyatakan bahwa partisipasi dapat digerakkan melalui:

- a. Peningkatan peranan proyek pembangunan desa yang dirancang secara sederhana dan mudah dikelola oleh masyarakat.
- b. Organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang mampu menggerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- c. Peningkatan peranan masyarakat dalam pembangunan.”

“partisipasi dapat dianggap sebagai tolak ukur dalam menilai apakah proyek yang bersangkutan merupakan proyek pembangunan desa atau bukan.jika masyarakat desa yang bersangkutan tidak berkesempatan dalam suatu proyek didesanya, berarti proyek tersebut pada hakekatnya bukanlah proyek pembangunan desa. Sautoy (dalam Ndraha, 1987 : 104)

Betapapun jelasnya bahwa partisipasi masyarakat merupakan syarat utama dalam kehidupan demokrasi di era ekonomi ini, namun semua itu tidak akan berjalan dengan sendirinya tanpa adanya usaha-usaha.

Menurut Sutoro (2001 : 32) ada beberapa strategi untuk memperkuat partisipasi rakyat dalam pembangunan:

1. Mengeksplorasi nilai-nilai yang berkaitan dengan semangat partisipasi. Nilai-nilai meliputi kebersamaan dan solidaritas, kesadaran kritis,sensitive terhadap perubahan,pekadan berpihak pada kelompoktertindas.
2. Menghidupkan kembali institusi-institusi volunteer sebagai mediakewargaan yang pernah hidupdan berfungsi. Eksistensi dan fungsi kelembagaan ini menjadi pilar nyata partisipasi warga dalam proses pembangunan,seperti keberadaan forum rembung desa.

3. Memfasilitasi terbentuknya asosiasi-asosiasi kewargaanyang baru berbasiskan kepentingan kelompok keagamaan, ekonmomi, profesi, minat, dan hobbi, dan politik maupun aspek kultural lainnya.
4. Mengkampanyekan mengenai pentingnya kesadaran inklusif bagi warga desa di dalam menyikapi sejumlah perbedaan yang terjadi. Dengan mempertimbangkan kemajemukan.
5. Memperluas ruang komunikasi publik, yang dimanfaatkan warga desa untuk melakukan kontak-kontak social dan kerjasama . Kelima strategi diatas merupakan jalan penting untuk memperkuat partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan.

F. Pengertian Pembangunan

Jika kita mendengar kata pembangunan maka yang terlintas dalam pikiran kita adalah suatu perubahan akan terjadi, yaitu dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang ada berubah menjadi atau berganti dengan yang baru. Menurut Siagian

“konsep pembangunan yang konseptual dengan pembangunan di Indonesia bahwa pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa. (2003 : 147)

“pembangunan adalah suatu proses perubahan, perbaikan ataupun pembaharuan kearah yang lebih baik yang dilakukan oleh suatu bangsa atau Negara” Pratikno(2002 : 119).

Pembangunan sebagai proses yang memungkinkan anggota masyarakat meningkatkan kapasitas nasional dan legitimasi dalam memobilisasi dan mengelol sumber daya untuk menghasilkan perbaikan kualitas yang sesuai dengan aspirasi mereka, berkelanjutan adil dan merata. Ada beberapa ide pokok mengenai pembangunan :

1. Pembangunan merupakan proses yang berarti, pembangunan itu berlangsung secara berkelanjutan dan terencana.
2. Usaha yang dilakukan secara sadar dan terarah kepada perbaikan dan peningkatan.
3. Bagian sentral dan integral dari usaha perubahan bangsa yang pada gilirannya akan mencapai tujuan bangsa dan Negara yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan Menurut Michael P. Todaro (2003 : 36) tujuan pembangunan harus berdasarkan pada tiga komponen, yaitu:

1. Kecukupan (Sustance)

Berarti kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Dapat diartikan bukan hanya menyangkut makanan melainkan mewakili semua hal yang merupakan kebutuhan dasar manusia secara fisik, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keamanan. Jika satu dari sekian banyak kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi maka muncullah kondisi keterbelakangan

absolute. Fungsi dasar dari semua kegiatan ekonomi pada hakekatnya adalah untuk menyediakan sebanyak mungkin bekal guna menghindari segala kesenjangan dan ketidakberdayaan akibat dari kekurangan salah satu dari kebutuhan dasar.

2. Jati diri, menjadi manusia seutuhnya

Untuk mencapai kehidupan yang lebih baik adalah dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghindari diri sendiri untuk merasa pantas dan layak melakukan/mengejar sesuatu yang diinginkan semuanya terangkum dalam jati diri (self esteem). Pencarian jati diri bukanlah hal yang sepele, sekali jati diri hilang maka hilanglah segala-galanya. Penyebaran nilai-nilai modern yang bersumber dari negara-negara maju telah mengakibatkan terkikisnya jati diri masyarakat Negara berkembang.

3. Kebebasan (freedom) dari sikap menghambat

Kemerdekaan dan kebebasan (freedom) diartikan sebagai tegak berdiri tidak diperbudak oleh pengajaran aspek-aspek material. Kebebasan berarti dapat berpikir jernih, terlepas dari ajar dogmatis dan memiliki kemampuan untuk memiliki perilaku yang tersedia. Hilangnya kebebasan dan pertumbuhan ekonomi bukan berarti menambah kekayaan tetapi menambah pilihan. Konsep kebebasan manusia juga melingkupi segenap komponen yang terkandung dalam konsep politik termasuk keamanan diri pribadi, kepastian hukum, kemerdekaan berekspresi, partisipasi politik dan persamaan kesempatan.

1. Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan

Pembangunan masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan swadaya. Membangun untuk mendidik agar masyarakat mampu membantu mereka sendiri, tidak selalu bergantung ada bantuan-bantuan yang membuat ketergantungan. Akses sumber daya alam (bumi, air, hutan, dan lain-lain) pada hakikatnya adalah untuk masyarakat, merupakan suatu hak yang sangat mendasar, karena sumber daya inilah yang menjadi sumber mata pencaharian warga untuk mencukupi kehidupannya. Pengelolaan sumber daya hendaknya berbasis masyarakat tidak hanya terbatas pada pelibatan masyarakat tetapi harus mengkomodifikasi pandangan-pandangan, pendapat masyarakat setempat. Dari sekian banyak permasalahan yang harus dibenahi demi tercapainya pembangunan masyarakat, partisipasi mereka dalam proses pembangunan adalah sangat dibutuhkan, karena salah bukti pembangunan yang telah berhasil adalah ketika partisipasi masyarakat terlihat dalam pembangunan. Partisipasi warga yang sangat tinggi, tingkat kepedulian yang besar akan menjadi modal utama dalam mensukseskan tujuan pembangunan.

G. Pengaruh kepemimpinan camat terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Dapat dilihat bahwa kepemimpinan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan atau partisipasi anggota dalam suatu organisasi, karena apabila seorang pemimpin baik dalam menjalankan tugasnya, maka dengan sendirinya anggotanya akan percaya dan rasa simpati akan timbul seiring berjalannya roda organisasi yang semakin baik. Organisasi yang berjalan dengan baik, otomatis dukungan serta partisipasi masyarakatpun akan semakin tinggi, dan sebaliknya apabila pemimpin tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik maka rasa simpati anggota dan tingkat partisipasi anggotakan semakin rendah dikarenakan ketidakpercayaan anggota kepada pemimpinnya. Demikian juga kepemimpinan camat dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat, camat selaku pemimpin dikecamatannya biasanya dan sepatutnya selalu dekat atau berhubungan dengan masyarakat, dari hubungan tersebut akan timbul kerjasama antara pemimpin dengan yang dipimpin karena saling membutuhkan, dengan demikian akan timbul rasa tanggung jawab disertai keinginan untuk turut serta berpartisipasi atau ambil bagian dalam pelaksanaan pembangunan dikecamatannya khususnya di desanya.

Menurut Kartono (1982 :31) ada tiga hal penting mengenai konsepsi persyaratan kepemimpinan:

1. **Kekuasaan** ialah kekuatan, otoritas dan legalitas yang memberi wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu.
2. **Kewibawaan** ialah kelebihan, keunggulan, keutamaan, sehingga orang mampu membawahi atau mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh pada pemimpin, dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.
3. **Kemampuan** ialah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan kecakapan/ketrampilan teknis maupun social, yang bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa sebagai seorang pemimpin, camat harus mempunyai kemampuan yang lebih dari masyarakatnya, dan juga kewibawaan agar masyarakat dapat menghormatinya dan bertindak dengan kerelaan tanpa ada rasa takut. Camat harus orang yang benar-benar mampu mengetahui dan memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan berusaha mengupayakan kegiatan yang dikehendaki masyarakat. Dengan demikian akan tercipta peluang yang besar bagi masyarakat untuk bersedia turut serta dalam memberikan partisipasinya. Dalam rangka pelaksanaan partisipasi, ada beberapa sumbangan yang dapat diberikan masyarakat sebagai sumbangan dalam rangka pencapaian tujuan.

Adapun jenis partisipasi itu

menurut Hamijoyo (dalam Simanjuntak, 1989 : 49)

1. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa.
2. Partisipasi tenaga, yang diberikan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa.
3. Partisipasi harta benda, yang diberikan untuk pembangunan.
4. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda kegotongroyongan, misalnya koperasi dan lain-lain. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa sangat banyak sumbangan yang dapat diberikan masyarakat bagi kemajuan desanya, makanya dituntut peran camat, kepala desa untuk dapat merangsang masyarakat untuk dapat berpartisipasi.

Berdasarkan penelitian Smith dan Blus (Ndraha, 1990:120) berkesimpulan bahwa masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika :

1. Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.
2. Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada ditengah masyarakat.
3. Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat.
4. Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat

.MenurutJuliantara (201: 85) pengembangan partisipasi rakyat membutuhkan dua langkah sekaligus yakni:

1. Memperkuat kapasitas kritis masyarakat
2. Memperkuat kelembagaan yang ada

Dapat dilihat bahwa kaitan partisipasi masyarakat dengan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri adalah sangat erat. Keterlibatan masyarakat dalam aktivitas pembangunan menunjukkan adanya kemampuan masyarakat untuk hidup mandiri demi memajukan desanya. Tinggal bagaimana lagi pemimpin memaksimalkan peran dan tanggung jawabnya serta memberikan pengaruh yang baik kepada masyarakat untuk memotivasi agar terlibat dalam pelaksanaan pembangunan.



BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Administrasi pemerintahan dan keadaan demografi.

Untuk melaksanakan tugas kewenangan otonomi daerah di pemerintahan kabupaten arguni bawah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pejabat Pembina aparatur pemerintahan daerah dalam melaksanakan manajemen pegawai negeri sipil daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pembinaan seluruh aparatur pemerintah yang ada pada setiap daerah.

Pemerintah kecamatan Agruni bawah dimekarkan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA), Kabupaten Kaimana Nomor 12 Tahun 2007, maka dibentuklah 7 (tujuh) Pemerintahan Distrik baru sebagai unsur penunjang Pemerintah daerah dalam pembangunan. salah satu diantaranya adalah Distrik Arguni Bawah, dengan luas wilayah sekitar 5000Ha dan membawahi 14 desa/kampung. dengan letak geografis sebagai berikut.

- Sebelah utara berbatasan dengan :Kabupaten teluk Bintuni
- Sebelah selatan berbatasan dengan :Distrik Kaimana

- Sebelah barat berbatasan dengan :Kabupaten FAK-FAK
- Sebelah timur berbatasan dengan :Kabupaten Wondama

Untuk mendeskripsikan jumlah kelurahan dan penyebarab penduduk dalam wilayah kecamatan Arguni bawah disajikan pada table 1

Tabel 1
jumlah Kampung yang dirinci berdasarkan jenis kelamin

| No | Nama Desa/Kampung | Keadaan Penduduk | | Jumlah |
|----|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1 | Kampung Tanusan | 1884 | 1966 | 3.850 |
| 2 | Kampung Mandiwa | 1102 | 1.265 | 2.367 |
| 3 | Kampung Warmenu | 992 | 1021 | 2.013 |
| 4 | Kampung Egerwara | 642 | 863 | 1.505 |
| 5 | Kampung Kufuriyai | 779 | 823 | 1.602 |
| 6 | Kampung Manggera | 759 | 955 | 1.714 |
| 7 | Kampung Jawera | 435 | 521 | 956 |
| 8 | Kampung Urisa | 342 | 564 | 906 |
| 9 | Kampung Ukiara | 371 | 441 | 812 |
| 10 | Kampung Sumun | 462 | 532 | 994 |
| 11 | Kampung Seraron | 451 | 533 | 984 |
| 12 | Kampung Nagura | 257 | 578 | 835 |
| 13 | Kampung Inari | 436 | 546 | 982 |
| 14 | Kampung Wanoma | 352 | 455 | 807 |
| | Jumlah | 9.264 | 11.063 | 20.327 |

Sumber data:Kantor Kecamatan Argunu Bawah 2009

B. Struktur Organisasi Kecamatan Argni Bawah

Bahwa untuk memudahkan pemahaman dan tindak lanjut penjabaran sebagaimana yang telah diatur dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48

Tahun 1996 Tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan, maka diperlukan uraian tugas dan tata kerja pemerintah Kabupaten Kaimana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); Peraturan Pemerintah Daerah dalam lingkungan daerah dalam Propinsi Irian Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 970).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245); Adapun susunan organisasi pemerintah Kecamatan (distrik) Argunu bawah kabupaten Kaimana adalah sebagai berikut :

- a. Camat (Kepala Distrik)
- b. Sekretaris Camat (Distrik)
- c. Seksi Pemerintah
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- e. Seksi Pembangunan Masyarakat kampung / Kelurahan
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial
- g. Seksi Ekonomi dan pembangunan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Bertitik tolak pada uraian di atas, penulis akan mengemukakan tugas dan fungsi masing-masing bagian yang ada sebagai berikut :

1. Kepala Wilayah Kecamatan (Kepala distrik)

- a. Memimpin menyelenggarakan pemerintahan wilayah kecamatan.
- b. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum dan Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat II sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perundangundangan yang berlaku dan ketentuan yang diberikan Bupati Kepala Daerah yang bersangkutan.
- c. Melaksanakan kebijakan politik dalam usaha memelihara keamanan, ketertiban umum dalam keadaan tertib/sipil sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.
- d. Melaksanakan tugas bagian Prajaksa.
- e. Melaksanakan tugas-tugas dibidang Pemerintahan Sipil.
- f. Mengadakan kerja sama yang sebaik-baiknya dengan unsur-unsur TNI /POLRI setempat untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintah.

2. Sekretaris Wilayah (Sekcam)

- a. Membantu Camat dalam melaksanakan tugas, melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat pemerintahan wilayah Kecamatan.
- b. Melakukan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat pemerintah wilayah Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang terpadu.
- c. Melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program, dan petunjuk serta memonitor perkembangan penyelenggaraan pemerintah.
- d. Melakukan pembinaan terhadap kegiatan dibidang sosial politik dalam menyusun rencana pelaksanaan memberi bimbingan dan mengadakan kerja sama dengan aparatur pemerintah lainnya dalam rangka memelihara stabilitas politik.
- e. Melakukan pembinaan penyelenggaraan pembangunan desa dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data program dan petunjuk serta memonitor perkembangan pembangunan.
- f. Melakukan pembinaan penyelenggaraan pembangunan dalam arti memberi bimbingan teknis penyusunan tata desa, pelaksanaan kegiatan dalam rangka Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP), melakukan pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD),

meningkatkan Swadaya gotong royong masyarakat, melakukan Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat (PKK) serta memberikan penyusunan pembangunan desa .

3. Kepala Urusan Pemerintah

- a. Mengumpulkan, mensistematisasikan dan menganalisa data di bidang pemerintahan, sosial politik, ketentraman, dan ketertiban.
- b. Menyusun program penyelenggaraan pemerintahan. Pembinaan politik dalam negeri, pembinaan ideologi negara, pembinaan kewarganegaraan, pembinaan ketentraman dan ketertiban.
- c. Melakukan pengendalian dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan politik dalam negeri, pembinaan ideologi negara, pembinaan kewarganegaraan, pembinaan ketentraman dan ketertiban.
- d. Mempersiapkan pencalonan, pengangkatan, pemberhentian Desa/Lurah, pejabat-pejabat lainnya, serta memberikan bimbingan dan petunjuk mengenai pelaksanaan pemilihan kepala Desa/Lurah.
- e. Melakukan dan membina pelaksanaan administrasi kependudukan dan catatan sipil serta melakukan pembinaan administrasi Desa/Lurah.
- f. Melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum.

- g. Melakukan kegiatan dalam rangka usaha-usaha untuk memantapkan koordinasi pelaksanaan pemerintah dengan instansi-instansi lain.
- h. Mempersiapkan bahan-bahan pembinaan dalam rangka pembinaan ketenagakerjaan.

4. Kepala Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Mengumpulkan, mensistematisasikan, dan menganalisa data untuk pembinaan kesejahteraan rakyat.
- b. Mempersiapkan penyusunan program pembinaan kesejahteraan rakyat.
- c. Mempersiapkan bahan-bahan pembinaan kesejahteraan rakyat.
- d. Mempersiapkan bahan-bahan pembinaan terhadap penderita cacat, tuna karya, tuna wisma, panti asuhan dan lain-lain.
- e. Mempersiapkan bahan-bahan kegiatan dalam rangka pencegahan, penanggulangan dan pertolongan bencana alam.
- f. Mempersiapkan bahan-bahan dan sasaran-sasaran dalam rangka pemberian izin pertunjukan, pasar malam, keramaian, usaha sosial dan lain-lain.
- g. Mempersiapkan pemberian bantuan dan pelayanan serta bimbingan sosial lainnya.

5. Kepala Ekonomi dan Pembangunan.

- a. Mengumpulkan mensistematisasikan, dan menganalisa data pembangunan desa/kelurahan, dan pembangunan pada umumnya.

- b. Menyusun dan memberikan petunjuk penyusunan program pembanguna desa/ kelurahan, dan pembangunan pada umumnya.
- c. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan dalam masyarakat desa dan melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan kependudukan.
- d. Melakukan pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat (PKK) serta pembinaan lomba desa.
- e. Melakukan kegiatan dalam koordinasi perencanaan pembanguna sistem unit desa daerah kerja pembangunan wilayah kecamatan.
- f. Melakukan pembinaan pembangunan prasarana desa dan pengembangan perekonomian desa.
- g. Merumuskan rancangan dalam rangka pemberian terhadap lembaga-lembaga perekonomian desa.

6. Kepala Urusan Administrasi

- a. Mempersiapkan penyusunan naskah laporan pemerintah wilayah.
- b. Melakukan urusan surat menyurat .
- c. Melakukan pengetikan dan penggandaan surat-surat dan naskah dinas lainnya yang di pergunakan.
- d. Menyimpan, memelihara dan menemukan kembali arsip.

- e. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka mutasi pegawai (Pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, pindah, pensiun, pemberhentian dan lain-lain).
- f. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pemeliharaan kesejahteraan pegawai.
- g. Menerima, menyimpan, dan menyalurkan uang pemerintah wilayah kecamatan.
- h. Mengurus dan membayar gaji pegawai.
- i. Mengurus pembukuan keuangan.
- j. Mengurus pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan yang telah dikeluarkan.

7. Urusan Aparat Departemen Dalam Negeri

Unsur aparat Departemen Dalam Negeri adalah aparat Dalam Negeri yang diperbantukan kepada camat untuk melakukan tugas-tugas tertentu Departemen Dalam Negeri di Wilayah Kecamatan yang sehari-hari bertanggung jawab kepada camat secara fungsional dibina oleh perangkat yang menyelenggarakan fungsi-fungsi tersebut di Kabupaten/Kotamadya. Mengingat tugas dan fungsi dari kepala wilayah kecamatan beserta aparat pemerintah wilayah kecamatan yang semakin banyak dan kompleks, maka berdasarkan Surat Keputusan tersebut di atas di harapkan untuk mendapatkan atau menetapkan aparatur pemerintah yang semakin mampu dan tangguh, baik dalam melayanai masyarakat maupun dalam melayanai

tugas-tugas lainnya yang diberikan kepada fungsi Kepala Wilayah Kecamatan tidak dapat di perinci satu persatu karena sifatnya yang luas.

C. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Dalam Wilayah Kecamatan Arguni Bawah

Berdasarkan daftar rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Arguni bawah berjumlah 37 orang dengan deskripsi sebagai berikut :

Tabel 2

**Keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan
Di Kecamatan Arguni Bawah**

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Persen |
|---------------|----------------------|-----------|------------|
| 1 | SARJANA | 8 | 34,29 |
| 2 | SARJANA MUDA/DIPLOMA | 9 | 20 |
| 3 | SLTA | 20 | 45,71 |
| Jumlah | | 37 | 100 |

Sumber :kantor camat Arguni Bawah 2009

Data pada tabel 2 di atas mendeskripsikan bahwa tingkat pendidikan pegawai yang ada di Kecamatan Arguni Bawah masih didominasi tamatan Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat. Keadaan ini juga memberikan informasi kepada masyarakat kecamatan arguni bawah bahwa masih banyak pegawai kecamatan yang masih diragukan kempauan kerjanya sebab mereka masih melalui pendidikan umum atau sederajat dengan SMU.

Tenaga kerja yang masih melalui tingkat pendidikan yang sederajat dengan SMU tentu masih disangsikan keterampilan kerja yang dimiliki, sebab di sekolah

umum mereka memperoleh pendidikan umum atau dasar-dasar keterampilan umum, sehingga mereka masih sangat membutuhkan suatu pendidikan keterampilan apabila mereka telah memasuki dunia kerja. Untuk mengetahui gambaran atau keadaan pegawai kecamatan yang memiliki golongan/keangkatan yang dapat dilihat pada

Tabel 3

**KEADAAN PEGAWAI PADA KANTOR KECAMATAN
ARGUNIBAWAH BERDASARKAN TINGKAT GOLONGAN**

| NO | PANGKAT/GOLONGAN | JUMLAH |
|-----------|-------------------------|---------------|
| 1 | IV | 0 |
| 2 | III | 17 |
| 3 | II | 20 |
| 4 | I | 0 |
| 5 | Tenaga Kontrak | 0 |
| | JUMLAH | 37 |

Data pada tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah pegawai Kecamatan Arguni Bawah yang menduduki golongan II cukup besar yaitu 20 atau sekitar 71,43 persen dari jumlah pegawai yang ada dalam wilayah Arguni Bawah.

D. Visi , Misi, dan Renstra

1. Visi

Terciptanya SDM aparatur yang profesional, kompetitif dan berintegritas tinggi disemua aspek pelayanan masyarakat berdasarkan ajaran agama dan nilai-nilai sipamandar.

2. Misi :

Untuk terciptanya visi tersebut, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan umum pengembangan SDM Aparatur yang Prima;
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan dan pelatihan PNS;
- c. Sistem prestasi kerja dalam pengembangan karir PNS;
- d. Mengutamakan prinsip gotong royong
- e. Optimalisasi kinerja, disiplin, akhlak, etika budaya dan moralitas PNS;
- f. Meningkatkan tertib dan efektifitas administrasi;

3. Program

Sebagai implementasi tugas pokok dan fungsi badan kepegawaian dan diklat daerah dalam rangka penyelenggara kebijakan teknis di bidang pendayagunaan aparatur ditetapkan rencana prioritas :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan
- f. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur



g. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

4. Kegiatan

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tujuan : Optimalnya pelayanan administrasi perkantoran

- Sasaran** :
1. Optimalnya pelayanan Surat Menyurat;
 2. Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, listrik, dan air;
 3. Terjaminnya pemeliharaan kesehatan pegawai;
 4. Terpenuhinya administrasi perizinan kendaraan dinas;
 5. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor.
 6. Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan dokumen kantor
 7. terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor
 8. Tersedianya peralatan kebersihan kantor dan bahan pembersih
 9. Tersedianya Bahan Bacaan umum dan peraturan Per UUan
 10. Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum harian, rapat dan tamu
 11. Terakomodasinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi tugas pokok dan fungsi

12. Terpenuhiya honorarium pegawai Tidak Tetap

b. Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur

Tujuan : Terpenuhiya kebutuhan sarana dan prasarana kerja
aparatur

Sasaran : 1. Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor
2. Tersedianya peralatan gedung kantor
3. Terjaminnya fungsi fasilitas gedung kantor
4. Terjaminnya Pemeliharaan kendaraan dinas
5. Terjaminnya fungsi peralatan gedung kantor

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tujuan : Meningkatnya Disiplin dan Kinerja Aparatur

Sasaran : 1. Tersedianya pakaian dinas harian pegawai;
2. Tersedianya pakaian olah raga pegawai;

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Tujuan : Meningkatnya Pemahaman aparatur terhadap peraturan
perUUan sesuai dengan tupoksinya

Sasaran : Tersedianya akomodasi untuk mengikuti sosialisasi peraturan perUUan

1. Tersedianya akomodasi untuk mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi peraturan PerUUan;

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan

Tujuan : Tersedianya data dan informasi akuntabilitas kinerja dan keuangan

Sasaran : 1. Tersedianya laporan kinerja dan pertanggung jawaban kegiatan SKPD

2. Tersedianya laporan keuangan semesteran dan laporan prognosis keuangan semesteran II
3. Tersedianya dokumen pelaporan keuangan akhir tahun
4. Tersedianya Dokumen perencanaan anggaran dan Dokumen pelaksanaan anggaran

f. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Tujuan : Meningkatnya Kualitas intelektual. Manajerial serta sikap perilaku aparatur

- Sasaran** : 1. **Meningkatnya kualitas dan kompetensi pegawai**
2. **Meningkatnya kualitas dan kompetensi pejabat eselon II, III dan IV;**

g. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Tujuan : **Meningkatnya Kinerja Manajemen Kepegawaian kecamatan**

Sasaran : 1. **Terjaminnya efektifitas, objektifitas dan akuntabilitas pemanguna kecamatan;**

2. **Optimalkan Proporsionalitas pembangunan kampung;**
3. **Terjaminnya efektifitas Pengelolaan Administrasi;**
4. **Terjaminnya Validitas data dan informasi mengenai masyarakat;**
5. **Optimalnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Disiplin PNS**
6. **Terpenuhinya kebutuhan biaya pendidikan PNS Tugas Belajar.**

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembangunan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengembangan daerah. Agar pengembangan daerah tercapai dengan maksimal maka perlu dilibatkannya masyarakat dalam pembangunan daerah yang mengarah kepada tingkat kepedulian masyarakat dalam pengembangan daerah. Partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan disetiap sektor yang ada di Distrik (Desa), dan dapat pula menambah pengetahuan, keterampilan, baik yang secara langsung dan tidak langsung menyangkut pekerjaan, maupun cara dan teknik pengembangan tersebut secara tepat guna.

Dengan demikian pengembangan daerah pada dasarnya dapat di pandang sebagai investasi yang imbalannya baru dapat dinikmati beberapa tahun kemudian dalam bentuk pertambahan pendapatan daerah dan keterampilan kerja. Peningkatan pengembangan daerah yang mengarah padapeningkatan pendapatan daerah. Sedangkan peningkatan pembangunan daerah ini akan tercermin dalam pembangunan yang merata dan dapat dinikmati setiap warga distrik (Desa). Oleh karenanya, hubungan antara pemerintah dan masyarakat juga akan tercermin dalam tingkat partisipasi yang sering dilakukan. Pengembangan didaerah pada dasarnya dilaksanakan penuh oleh pemerintah, namun dalam pelaksanaannya masyarakat juga

dalam pengembangan daerah.pembangunan juga akan sangat terasa manfaatnya pada peningkatan sarana prasana yang menunjang kebutuhan warga distrik (desa).

Hal ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, dan untuk mengubah sikap dan pola pikir masyarakat kearah yang lebih baik dan professional. Menurut wawancara dengan Kepala Distrik Arguni Bawah pada tanggal 10 november 2010 diungkapkan bahwa pengambilan langkah langkah kebijakan yang diharapkan adalah adanya peningkatan partisipasi masyarakat dengan pemerintah itu sendiri dalam menjalankan tugasnya, lebih lanjut Kepala Distrik juga mengatakan: “distrik Arguni senantiasa memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat yang ada pada setiap kampung yang memenuhi syarat dan berkemampuan dan berbakat untuk mengikuti program pengembangan daerah yang baik dilaksanakan oleh Distrik sendiri, maupun di kampung”.

Selanjutnya kepala Distrik mengatakan bahwa syarat-syarat bagi masyarakat dan kampung yang ingin mengikuti program tersebut yaitu:

1. Warga kampung pada distrik Arguni Bawah
2. Mampu dalam menggerakkan Masyarakat
3. Memenuhi syarat,

Pada kesempatan lain kepala Distrik mengatakan bahwa: “program pengembangan kampung merupakan sarana yang ditujukan pada upaya untuk lebih mengaktifkan dan lebih mengoptimalkan masyarakat yang kurang aktif sebelumnya,

mengurangi dampak-dampak negatif yang dikarenakan rendahnya pendidikan, kurangnya pengetahuan, pengalaman terbatas, atau kurangnya kepercayaan diri dari masyarakat tersebut. Melalui program pengembangan kampung atau pengembangan SDM masyarakat kampung tujuan pokoknya adalah dapat ditingkatkannya pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap masyarakat sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran-sasaran dan program-program ataupun tujuan kampung”.

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas sebagai warga distrik (Desa) dengan dilandasi kepribadian dan etika.
2. Menciptakan aparaturnya yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat Persatuan dan kesatuan bangsa
3. Memanfaatkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.
4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

A. tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kecamatan Arguni Bawah, kabupaten Kaimana.

1. Partisipasi Masyarakat

Kalau kita mengamati seorang karyawan yang belum ahli belajar memperoleh suatu keterampilan tertentu, tampaklah suatu proses yang cukup rumit sedang berlangsung. Dari berbagai penelitian bisa dikemukakan berbagai prinsip yang berguna sebagai pedoman dalam proses perubahan keterampilan, pengetahuan dan sikap tersebut. Diantara pedoman-pedoman itu adalah sebagai berikut:

- a. **Motivasi.** Semakin tinggi motivasi seorang karyawan, semakin cepat ia akan mempelajari atau pengetahuan baru tersebut. Latihan sebagai alat haruslah dihubungkan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh para karyawan (seperti upah yang lebih baik, kedudukan yang lebih baik dan lain sebagainya).
- b. **Laporan kemajuan.** Laporan kemajuan diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh seorang karyawan telah memahami pengetahuan yang baru. Meskipun demikian pembuatan laporan kemajuan yang terlalu sering adalah tidak disarankan.
- c. **Reinforcement.** Apabila suatu keterampilan sedang dipelajari, proses belajar perlu diperkuat dengan hadiah ataupun hukuman. Manajemen harus bisa menentukan agar setiap hadiah dikaitkan dengan kemajuan para karyawan.
- d. **Praktek.** Mempraktekkan apa yang dipelajari jelas merupakan hal yang sangat penting. Sedapat mungkin para karyawan yang dilatih bisa mempraktekkan keterampilan tersebut pada suasana pekerjaan yang sebenarnya.

e. Perbedaan individual. Meskipun pelatihan kelompok sering mempunyai kelebihan ekonomis, perlulah disadari bahwa pada hakikatnya karyawan itu berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Karena itu latihan yang efektif hendaknya menyesuaikan kecepatan dan kerumitan dengan kemampuan masing-masing individu.

Tingkat Pendidikan juga mempengaruhi dalam tingkat partisipasi masyarakat dengan adanya program peningkatan pengembangan. Ini berguna bagi peningkatan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat itu sendiri guna mendapatkan masyarakat yang berkualitas yang mantap baik dari segi keterampilan dan pola pikir yang berubah.

Tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan adanya program pengembangan daerah (kampung) oleh yang diberikan kepada seluruh kampung (Desa). sebaiknya disusun oleh beberapa pakar sesuai tujuan yang ingin dicapai. Begitu pula harus diikuti oleh pakar pendidikan baik pakar paedagogi maupun andregogi, sehingga tujuan program pengembangan Distrik yang dilaksanakan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Untuk mengetahui tingkat kehadiran masyarakat dalam setiap pertemuan yang diadakan pada setiap kampung (Desa) pada tabel 4.

Tabel.4

**TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI
KEHADIRAN MASYARAKAT DALAM RAPAT DESA**

| NO | KATEGORI | FREKUENSI | PRESENTASE |
|--------|---------------|-----------|------------|
| 1 | Sangat Sering | - | - |
| 2 | Sering | 35 Orang | 35,04 % |
| 3 | Kadang kadang | 50 Orang | 50.05 % |
| 4 | Jarang Sekali | 14 Orang | 14,01 % |
| 5 | Tidak Pernah | - | - |
| JUMLAH | | 99 Orang | 100 % |

Sumber : hasil olahan data 2010

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden menyatakan tingkat kehadiran mereka dalam rapat desa,yaitu Sering berjumlah 35 orang (35,4 %) dan menyatakan kadang kadang 50 orang (50,5%) dan menyatakan jarang sekali berjumlah 14 orang (14.1%). Ini berarti tingkat kehadiran cukup banyak,orang menunjukkan respon masyarakat terhadap desanya,akan tetapi masih ada yang kadang-kadang hadir dikarenakan kesibukan kerja.selanjutnya untuk mengetahui berapa banyak masyarakat dalam menggunakan hak suara dalam pertemuan desa disajikan pada table 5.

Tabel 5

**TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI PARTISIPASI
MASYARAKAT
DALAM MENGELUARKAN PENDAPAT**

| NO | KATEGORI | FREKUENSI | PRESENTASE |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | Sangat Sering | - | - |
| 2 | Sering | 25 Orang | 25,3 % |
| 3 | Kadang – Kadang | 50 Orang | 50,5 % |
| 4 | Jarang Sekali | 24 Orang | 24,2 % |
| 5 | Tidak Pernah | - | - |
| JUMLAH | | 99 Orang | 100% |

Sumber : hasil olahan data 2010

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yang menyatakan kadang-kadang mengeluarkan pendapatnya sebanyak 50 Orang (50,5 %), yang menyatakan jarang sekali 24 Orang (24,2 %) dan responden yang menyatakan sering sebanyak 25 Orang (35,3 %)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang responden. Jarangnya masyarakat mengeluarkan pendapat dikarenakan jarang nya pendapat yang disampaikan itu dijalankan, dan juga dinamikayang terjadi dalam rapat dikuasai orang-orang tertentu yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalam masyarakat. kemudian untuk mengetahui seberapa sedianya masyarakat dalam mengeluarkan bantuan dapat dilihat pada table 6.

Tabel 6

**TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI KESEDIAAN WARGA
MEMBERIKAN BANTUAN DALAM PEMBANGUNAN KAMPUNG (MATERI
DAN TENAGA)**

| No | Kategori | Frekuensi | Presentase |
|--------|-----------------------|-----------|------------|
| 1 | Sangat Tinggi Sekali | - | - |
| 2 | Tinggi Sekali | 34 Orang | 34,4 % |
| 3 | Cukup Tinggi | 50 Orang | 50,5 % |
| 4 | Kurang | 15 Orang | 15,1 % |
| 5 | Tidak ada sama sekali | - | - |
| JUMLAH | | 99 Orang | 100 % |

Sumber : hasil olahan data 2010

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa dari 99 Orang responden, 50 orang (50,5 %) menyatakan bersedia memberikan bantuan baik tenaga maupun materi, sedangkan 34 orang (34,4 %) menyatakan tinggi sekali kesediaan warga 15 orang (15,1 %) menyatakan kurang sedia.

Dari hasil wawancara dengan beberapa orang responden diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan bantuan dalam pembangunan cukup tinggi, namun masih ada yang masih kurang bersedia. ini disebabkan karena masyarakat tidak memiliki materi untuk disumbangkan melainkan hanya menyumbangkan tenaga. contohnya kerja bakti sekali seminggu. untuk dapat mengetahui seberapa peduli masyarakat dalam merawat hasil pembangunan disajikan pada table 7.

Tabel 7

**TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI KESEDIAAN MASYARAKAT
DALAM MERAWAT HASIL PEMBANGUNAN**

| No | Kategori | Frekuensi | Persentase |
|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1 | Tidak Ikut | - | - |
| 2 | Jarang | 20 orang | 20,2 % |
| 3 | Kadang-Kadang | 49 orang | 49,5 % |
| 4 | Sering | 30 orang | 30,3 % |
| 5 | Sangat sering | - | - |
| JUMLAH | | 99 Orang | 100 % |

Sumber : hasil olahan data 2010

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden menyatakan kadang kadang merawat hasil pembangunan 49 orang (49,5 %), yang menyatakan sering merawat hasil pembangunan 30 orang (30,3 %) sedangkan yang jarang sekali merawat hasil pembangunan 20 orang (20,2 %). Ini berartikesadaran masyarakat akan tanggung jawab merawat hasil pembangunan masih kurang. Menurut wawancara yang dilakukan, bahwa kurangnya kesadaran tersebut, dikarenakan hasil pembangunan yang masih sangat kurang, hanya sebatas pengairan sawah rumah ibadah dan sekolah, belum semua masyarakat yang merasakan hasil pembangunan yang dilaksanakan. seberapa manfaat yang dihasilkan dari pembangunan dapat dilihat pada table 8.

Tabel 8

**TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI MANFAAT HASIL
PEMBANGUNAN**

| No | Kategori | Frekuensi | Persentase |
|--------|---------------|-----------|------------|
| 1 | Sangat Terasa | - | - |
| 2 | Terasa | - | - |
| 3 | Cukup Terasa | 85 orang | 85,9 % |
| 4 | Kurang Terasa | 14 orang | 14,1 % |
| 5 | Tidak Terasa | - | - |
| JUMLAH | | 99 orang | 100 % |

Sumber : hasil olahan data 2010

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yang menyatakan cukup tersa sebanyak 85 orang(85,5 %) dan yang menyatakan kurang terasa sebanyak 14 orang (14,1 %). Pada umumnya responden yang menyatakan cukup terasa adalah yang berprofesi ebagai petani/pekerja lading yaitu adanya pembangunan irgasi, an pemberian bantuan bibit tanama khususnya padi.

Bertolak dari tanggapan masyarakat seperti diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan fungsi sebagai pelayan terhadap masyarakat yang berhubungan dengan sikap dan perilaku aparat kantor distrik arguni bawah dalam melayani masyarakat tergolong memuaskan,hal ini merupakan indicator keberhasilan program pembangunan yang diterapkan didistrik arguni bawah.

Sejala dengan pendapat tersebut diatas yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,maka uraian berikut diatas maka masyarakat

sebagai peran pemerintah dalam menjalankan pembangunan cukup membantu dalam segala bidang.

B. kepemimpinan Camat dan pengaruhnya terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kecamatan Argui Bawah

Pada era reformasi yang ditandai dengan otonomi daerah dewasa ini, pengembangan sumber daya manusia akan memperoleh perhatian khusus. Karena sumber daya manusia yang terampil, kreatif dan bermotivasi kerja yang tinggi, masalah keterbatasan dana, baik dana dari dalam perekonomian sendiri maupun dana yang didapat dari luar yang dewasa ini kita hadapi, seharusnya tidak lagi merupakan kendala laju pengembangan pembangunan daerah yang mencakup berbagai bidang, baik dari segi aspek jasmaniah maupun dari aspek-aspek keterampilan dan moral, akan dilakukan secara terarah dan terpadu dalam pembangunan yang akan datang. Sedangkan peningkatan sumber daya manusia dan pendaayagunaannya, hanya dapat dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja yang produktif dan merata. Keadaan ini perlu dilakukan suatu gerakan efesiensi dan produktifitas secara menyeluruh disegala bidang melalui suatu pendidikan dan pelatihan para pimpinan sehingga masalah-masalah pendaayagunaan aparatur pemerintah dapat teratasi.

Pengetahuan aparat pemerintah akan pelaksanaan tugas, sangat menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas dengan baik. aparat yang kurang memiliki pengetahuan yang cukup tentang bidang kerjanya akan bekerja tersendat-sendat, pemborosan bahan, waktu dan factor produksi yang lain akan diperbuat oleh aparat

yang belum memiliki pengetahuan cukup akan bidang kerja. Pemborosan ini akan mempertinggi biaya pencapaian tujuan organisasi. Dengan kata lain pengetahuan aparat harus diperbaiki dan dikembangkan agar mereka tidak berbuat sesuatu yang merugikan usaha-usaha pencapaian tujuan dengan sukses.

Kesuksesan masyarakat dalam pembangunan dan keterampilan baru sangat tergantung dari materi pembelajaran yang diterima pada saat menjalankam program pengembangan partisipasi pembangunan daerah yang dilaksanakan kepala Distrik Arguni Bawah sangat tergantung pemimpin yang melaksanakan program tersebut sebagai ujung tombak di daerah, data yang diperoleh disajikan pada tabel 9.

Table 9

**TANGGAPAN RESPONDEN
MENGENAI KEDISIPLINAN KEPALA
DISTRIK DALAM TUGAS DAN KEHIDUPAN SEHARI HARI**

| No | Kategori | Frekuensi | Persentase |
|--------|-----------------|-----------|------------|
| 1 | Sangat disiplin | - | - |
| 2 | disiplin | 30 orang | 30,3 % |
| 3 | Kadang-kadang | - | - |
| 4 | Kurang disiplin | 69 orang | 69,7 % |
| 5 | Tidak disiplin | - | - |
| JUMLAH | | 99 Orang | 100 % |

Sumber : hasil olahan data 2010

Kedisiplinan camat merupakan factor yang sangat penting bagi kemajuan pemerintahan kecamatan, khususnya bagi masyarakat akan lebih percaya dan dapat dijadikan contoh yang baik bagi kehidupan bermasyarakat, karena kedisiplinan masyarakat dimulai dari pemimpinnya.

Dari table diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden menyatakan camat kurang disiplin dalam tugas maupun kehidupan sehari-hari, ini dapat dilihat dari jumlah yang menyatakan camat kurang disiplin, yaitu 69 orang (69,7 %) dan yang menyatakan camat disiplin hanya berjumlah 30 orang (30,3 %)

Berdasarkan wawancara dengan salah satu responden kurang disiplinnya camat dilihat dari karena sering terlambatnya dan jarang berada di kantor, bukan untuk tugas kantor melainkan kepentingan pribadi.

Table 10

**TANGGAPAN RESPONDEN KEWIBAWAAN KEPALA DISTRIK
(CAMAT)**

| No | Kategori | Frekuensi | Persentase |
|---------------|------------------|-----------------|--------------|
| 1 | Sangat Berwibawa | - | - |
| 2 | Berwibawa | 40 orang | 40,4 % |
| 3 | Cukup Berwibawa | 59 orang | 59,6 % |
| 4 | Kurang Berwibawa | - | - |
| 5 | Tidak Berwibawa | - | - |
| JUMLAH | | 99 orang | 100 % |

Sumber : hasil olahan data 2010

Dari table diatas dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan kepala distrik (camat) cukup berwibawa berjumlah 59 orang (59,6 %) dan yang menyatakan kepala distrik (camat) berwibawa, akan tetapi masih ada yang menilai kurang berwibawa, ini dikarenakan masyarakat menilai dari berbicara dan cara berpakaian kepala distrik (camat) yang terkesan kurang rapih dalam kegiatan sehari-hari. Dalam mendeskripsikan kepemimpinan camat dalam kerjasama dengan bawahan dapat dilihat pada table 11.

Table 11

**TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI KERJASAMA
KEPALA DISTRIK(CAMAT) DENGAN BAWAHAN DI MASYARAKAT**

| No | Kategori | Frekuensi | Persentase |
|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1 | Sangat Sering | - | - |
| 2 | Sering | 60 orang | 60,6 % |
| 3 | Kadang-kadang | 39 orang | 39,4 % |
| 4 | Jarang Sekali | - | - |
| 5 | Tidak Pernah | - | - |
| JUMLAH | | 99 orang | 100 % |

Sumber : hasil olahan data 2010

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa responden menyatakan camat jarang sekali memaksakan kehendaknya dalam bertindak berjumlah 20 orang (20,2 %), yang menyatakan kadang-kadang 55 orang (55,6 %), dan yang menyatakan sering berjumlah 24 orang (24,2 %). ini berarti dalam menentukan keputusan mengenai kepentingan masyarakat camat cukup baik. Dalam mengerakkan upaya partisipasi dalam pembangunan pengarah camat dapat dilihat pada table 12.

Tabel 12

**TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI CARA KEPALA DISTRIK
DALAM MENYAMPAIKAN PENGARAHAN APAKAH DAPA DIMENGERTI**

| No | Kategori | Frekuensi | Persentase |
|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1 | Sangat Tenang | - | - |
| 2 | Tenang | 30 orang | 30,3 % |
| 3 | Cukup Tenang | 69 orang | 69,7 % |
| 4 | Kurang Tenang | - | - |
| 5 | Tidak Tenang | - | - |
| JUMLAH | | 99 orang | 100 % |

Sumber : hasil olahan data 2010

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan bahwa kepala distrik(camat),tenang dalam menghadapi masalah sebanyak 30 orang (30,3 %) dan yang menyatakan cukup tenang bagi orang 69 orang (69,7 %)

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang responden,mengenai bagaimana sikap camat dalam menghadapi masalah,masyarakat menilai bahwa camat adalah orang yang sangat bersahaja dan sangat dekat dengan masyarakat.guna dapat dikorelaksikan dengan tingkat kepedulian camat dengan masyarakat dapat dilihat pada table 13.

Table 13

**TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI
TINGKAT KEPEDULIAN KEPALA DISTRIK(CAMAT) TERHADAP
PERMASALAHAN DALAM MASYARAKAT**

| No | Kategori | Frekuensi | Persentase |
|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1 | Sangat peduli | - | - |
| 2 | peduli | 30 orang | 30,3 % |
| 3 | Cukup peduli | 50 orang | 50,3 % |
| 4 | Kurang peduli | 19 orang | 19,2 % |
| 5 | Tidak peduli | - | - |
| JUMLAH | | 99 orang | 100 % |

Sumber : hasil olahan data 2010

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan cukup peduli berjumlah 50 orang (50,5 %) dan yang menyatakan peduli 30 orang (30,3 %) dan yang menyatakan kurang peduli berjumlah 19 orang (19,2 %).ini berarti kepala distrik cukup bertanggung jawab akan permasalahan yang ada dalam

masyarakat dan juga mampu melakukan pendekatan yang cukup baik pada masyarakat.guna melihat tingkat kepedulian kepala distrik terhadap warga masyarakatnya dapat dilihat pada table 14.

Table 14

**TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI
KEPEDULIAN CAMAT TERHADAP KEGIATAN YANG ADA DI KAMPUNG
(DESA)**

| No | Kategori | Frekuensi | Persentase |
|--------|---------------|-----------|------------|
| 1 | Sangat peduli | - | - |
| 2 | peduli | 25 orang | 25,3 % |
| 3 | Cukup peduli | 49 orang | 49,4 % |
| 4 | Kurang peduli | 25 orang | 25,3 % |
| 5 | Tidak peduli | - | - |
| JUMLAH | | 99 orang | 100 % |

Sumber : hasil olahan data 2010

Berdasarkan table diatas diketahui bahwa kebanyakan responden yang menyatakan camat peduli dengan kegiatan yang ada dikampung-kampung sebanyak 25 orang (25,3 %) dan yang menyatakan cukup peduli sebanyak 49 orang (49,4 %), dan responden yang menyatakan bahwa kurang peduli sebanyak 25 orang (25,3 %).

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti, contoh kegiatan tersebut adalah kegiatan keagamaan dan kegiatan kepemudaan. Dibidang keagamaan misalnya peringatan hari besar keagamaan, kepala distrik peduli terbukti diadakannya penyambutan hari besar agama, dibidang kepemudaan dengan menggalakkan kegiatan karang taruna dan juga pertandingan olah raga antar kampung, dengan yang dalam hal

ini memperebutkan piala kepala distrik dan sebagainya. Sehingga ini dapat mempererat hubungan kekerabatan antar masyarakat.

Table 15

**TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI
SIKAP KEPALA DISTRIK (CAMAT) DALAM MENERIMA KRITIKAN DAN
SARAN DARI MASYARAKAT**

| No | Kategori | Frekuensi | Persentase |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 | Tidak Bersedia | - | - |
| 2 | Kurang Bersedia | - | - |
| 3 | Cukup Bersedia | 99 orang | 100 % |
| 4 | Kurang peduli | - | - |
| 5 | Tidak Bersedia | - | - |
| JUMLAH | | 99 orang | 100 % |

Sumber : hasil olahan data 2010

Berdasarkan table diatas diketahui bahwa 99 orang responden menyatakan kepala distrik (camat) bersedia menyikapi kritik dan saran yang datang dari masyarakat.

Dalam memimpin, dibutuhkan sifat terbuka untuk menerima saran dan kritik dari masyarakat, agar masyarakat dapat dengan langsung menyampaikan aspirasinya dan partisipasinya dan berani mengungkapkan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Partisipasi masyarakat menunjang suksesnya pelaksanaan pembangunan yang ingin diwujudkan secara bersama- sama.

C. kendala-kendala yang dihadapi Camat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Sasaran pengembangan pembangunan di daerah pada lingkup distrik Arguni Bawah kabupaten kaimana provinsi papua barat yaitu peningkatan kualitas dan keterampilan dan untuk meraih tujuan bermasyarakat yang cerdas. Namun usaha pengembangan tersebut akan sangat dipengaruhi oleh.

1. Faktor kondisi alam

Dalam setiap daerah yang beraneka ragan budaya dan keadaan geografis yang cukup sulit ditempuh dengan jalur darat seorang pimpinan harus mampu mempengaruhi, pengembangan pembangunan daerah. Berikut penilaian responden tentang peranan pemimpin yang harus mampu mengenali keadaan geografis daerah yang dipimpinnya.

Table 16

APAKAH KEPALA DISTRIK (CAMAT) MENGENALI DAERAHNYA

| No | Kategori | Frekuensi | Persentase |
|--------|--------------|-----------|------------|
| 1 | Tidak Kenal | - | - |
| 2 | Kurang Kenal | 24 orang | 24,2 % |
| 3 | Cukup Kenal | 50 orang | 50,5 % |
| 4 | Kenal | 25 orang | 25,3 % |
| 5 | Sangat Kenal | - | - |
| JUMLAH | | 99 orang | 100 % |

Sumber : hasil olahan data 2010

Tabel 16 diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai pimpinan distrik arguni bawah cukup kenal dengan daerah yang dipimpinnya 50 orang (50,5 %)

menyatakan kepala distrik cukup kenal dengan daerah nya, sedangkan 25 orang (25,3 %) menyatakan camat kenal dengan daerahnya, sedangkan 24 orang (24,2 %) menyatakan camat kurang kenal daerah nya

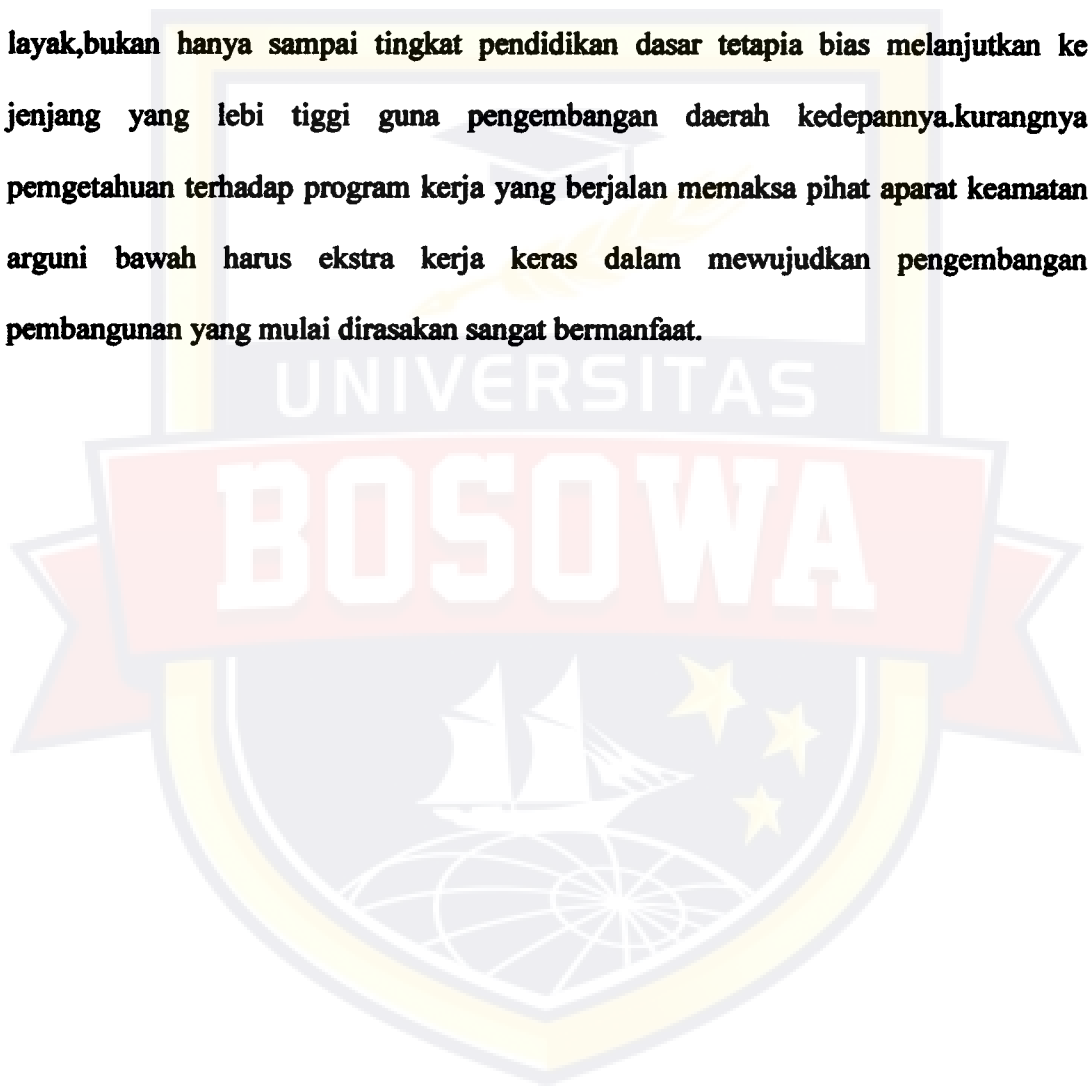
Kepala seksi pembangunan masyarakat kampung / kelurahan bahwa pimpinan selalu mengupayakan dekat dengan masyarakat dalam berbagai kesempatan, menurutnya dalam hal ini kepala distrik arguni bawah sangat mendukung program pengembangan pembangunan. salah satu buktinya yaitu menyiapkan aparatur dalam membimbing masyarakat dalam pengembangan daerahnya (kampung). selain itu juga, pengemanga kualitas aparatur juga ditngkatkan dengan mengikutkan dalam berbagai seminar di Provinsi.

2.kemampuan bahasa

Dalam masyarakat adat papua dikenal berbagai macam ragam bahasa yang berbeda setiap kampungnya, jadi aparat sangat sulit menguasai berbagai bahasa yang dipakai berkomunikasi, saat ini pemerintah provinsi papua barat yang bekerja am dengan kementerian pendidikan nasional tengah menggalakkan sekolah sekolah yang sifatnya paket C agar kiranya masyarakat dapat menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan eudahkan aparat pemerintah yang bertugas.

3.Faktor pengetahuan

searah dengan berjalannya pembangunan yang hampir menyentuh setiap aspek dalam kehidupan diharapkan agar masyarakat dapat menikmati pendidikan yang layak, bukan hanya sampai tingkat pendidikan dasar tetapi bias melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi guna pengembangan daerah kedepannya. Kurangnya pengetahuan terhadap program kerja yang berjalan memaksa pihak aparat keamanan di bawah harus ekstra kerja keras dalam mewujudkan pengembangan pembangunan yang mulai dirasakan sangat bermanfaat.



BAB V

PENUTUP

Pada bagian terakhir ini merupakan bab penutup akan dikemukakan kesimpulan dan saran penelitian sebagai berikut.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lingkungan distrik (kecamatan) Arguni bawah kab.kaimana prov papua barat tentang, Pengaruh Kepemimpinan Camat (Distrik) Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Arguni Bawah, Kabupaten Kaimana Papua Barat maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan partisipasi masyarakat lewat program pengembangan daerah sudah tergolong baik yang dilaksanakan oleh pemerintahan distrik Arguni Bawah. bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kemampuan bekerja serta untuk meningkatkan kerja sama antar aparat pemerintah dengan masyarakat. Oleh karena itu, perlu mengharuskan aparatur pemerintah dan masyarakat untuk mengikuti program tersebut.
2. Pelaksanaan pengembangan pembangunan daerah sudah tergolong baik yang dilaksanakan oleh pemerintahan distrik Arguni Bawah bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pembangunan atau berperan aktif dalam setiap pembangunan daerah

3. Dengan memperhatikan tabel 14, maka dapat kita ketahui bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan camat dalam tingkat kepedulian terhadap masyarakatnya. Menurut penulis, dengan memperhatikan persentase tersebut usaha-usaha pengembangan masih diperlukan, karena bagaimanapun baiknya struktur organisasi dan mekanisme kerja serta dukungan fasilitas, akan tetapi mutu orang-orang yang bekerja kurang memiliki kemampuan maka sulit untuk mencapai tujuan organisasi yang sempurna.
4. Hal yang menjadi ukuran bagi penulis sehingga perlunya Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Arguni Bawah, Kabupaten Kaimana Papua Barat yaitu:
 - Kualitas aparatur pemerintah sendiri
 - Untuk peningkatan pola pikir masyarakat
 - Peningkatan tingkat pendidikan masyarakat
5. Tanggapan aparatur pemerintah pada distrik arguni bawah bisa dikategorikan baik. Mereka menganggap bahwa masyarakat sangat perlu dibina dan dikembangkan kualitas dan kemampuannya. Semoga ini bisa menjadi pendorong untuk meningkatkan kemampuan dirinya.

B.Saran Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pengembangan pembangunan secara formal dan informal harus terus digalakkan untuk menciptakan aparatur pemerintah yang berkualitas dan profesional.
2. Perlu meningkatkan semangat aparatur pemerintah untuk mengembangkan kualitas dirinya secara berkesinambungan.
3. Anggaran untuk aparatur pemerintah sebaiknya harus ditingkatkan agar program pengembangan sumber daya aparatur pemerintah tidak berhenti di tengah jalan.
4. Aparatur pemerintah yang telah mengikut program pengembangan baik itu formal maupun informal agar jangan merasa cepat puas dan berbangga diri karena proses pengembangan sumber daya manusia itu merupakan proses yang berkesinambungan, masih banyak program pengembangan baik itu formal maupun informal yang harus diikuti untuk terus mengasah dalam meningkatkan kemampuan serta kualitas dirinya.

Demikian beberapa kesimpulan dan saran-saran yang penulis kemukakan semoga ada manfaatnya bagi pemerintahan distrik arguni bawah maupun instansi daerah lainnya serta pihak-pihak yang peduli akan pengembangan sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini; 1992, *Prosedur Penelitian* : Ribera Cipta, Jakarta
- Gibson: 2008 *Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen*: Gunung Agung, Jakarta
- Ghiselli; 1984 *Exploration In Managerial Talent*; Handoko Refika Aditama, Bandung.
- Handoko, Hani, T; 1984, *Manajemen*: BPFE, Yogyakarta
- Jabal, Ibrahim; 1992, *Sosiologi Pedesaan*: Umum Press, Malang
- Juliantara; 2001, *Pembaharuan Desa*: Lanpera, Jakarta
- Kristiadi: 2004: *Manajemen Sumber Daya Manusia*: Bumi Aksara, Jakarta.
- Kartono; 1995; *Tata Laksana Kantor dan Manajemen Perkantoran*; CV. Mandar Maju, Bandung.
- Kumorotoma, Wahyudi; 1992, *Etika Administrasi Negara*: Rajawali Pers, Jakarta
- Mubyarto; 2004, *Otonomi Masyarakat Desa*: Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat, Jakarta
- Nanawi; 2003; *Pengembangan Aparatur Pemerintah Suatu Tinjauan Teoritis*; Bumi Aksara, Jakarta.
- Nawawi, Hadari; 1992; *Pembinaan kepemimpinan daerah*; Tiara Wacana Jakarta.
- Ndara, Taliziduhu: 1983; *Pembangunan Masyarakat Desa*; Ribera Cipta, Jakarta
- Ndraha, Taliziduhu; 1997; *Pengantar Teori kepemimpinan*: Rineka Cipta, Jakarta
- Prof. Dr. V. Rifai: 2002 : *pemahaman tentang teori kepemimpinan*: Mandar Maju Bandung
- Pambudi, Himawan Dkk; 2003, *Politik Pemberdayaan, Jalan Menuju Otonomi Desa*
LAPPERA PUSTA UTAM, Yogyakarta
- Pratikno; 2002, *Komunikasi Pembangunan*: PT. Alumni, Bandung
- Rivai : 2003: *pola dasar kepemimpinan*: Edisi II: BPFE, Yogyakarta.
- Rnai, Veithzal, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*: Rajawali Press, Jakarta

